

## PEMERINTAH YANG BAIK BERAWAL DARI KERJASAMA YANG BAIK PULA



CIREBON- Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon diminta untuk mau saling bekerja sama. Kinerja juga harus ditingkatkan terlebih sejumlah tunjangan sudah diberikan kepada mereka.

Hal tersebut diungkapkan Pjs Walikota Cirebon, Dr. H Dedi Taufik, M.Si saat memimpin apel pagi di halaman kantor Pemerintah Daerah Kawasan Bima, Kota Cirebon, Senin, 5 Maret 2018. "Sekarang ini banyak sekali orang pintar, tapi sangat sedikit yang mau bekerja sama," tegas Dedi. Padahal kerjasama, koordinasi dan silaturahmi merupakan bagian dari konsep manajemen aset untuk keberhasilan suatu organisasi.



Dedi menekankan, setiap ide maupun gagasan harus dibangun dengan saling bekerja sama dan saling percaya. "Kata kuncinya, kepercayaan, komunikasi, kerja sama dan komitmen," ungkap Dedi. Dengan demikian, pemerintahan di Kota Cirebon bisa lebih maju untuk menyejahterakan warganya.

Karena itu, Dedi juga meminta kepada seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk terus meningkatkan kinerja mereka. "terlebih saat ini mereka juga sudah mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), berbasis kinerja"ungkap Dedi.



Jika kinerja semakin baik dan profesional, maka TPP pun akan maksimal. Dengan semua tunjangan yang sudah diberikan oleh negara tersebut Dedi berharap pelayanan kepada masyarakat juga bisa ditingkatkan.

## JELANG PILKADA, PERMASALAHAN KTP ELEKTRONIK DIMINTA SEGERA DITUNTASKAN



CIREBON- Pjs Wali Kota Cirebon meminta agar permasalahan KTP elektronik untuk segera diselesaikan. Permasalahan KTP elektronik tersebut sangat erat kaitannya dengan suksesnya penyelenggaraan pilkada di Kota Cirebon.

Hal tersebut diungkapkan Pjs Wali Kota Cirebon, Dr H. Dedi Taufik, M.Si, saat melakukan briefing staff di Kantor Pemerintah Daerah Kota Cirebon Kawasan Olahraga Bima, Senin, 5 Maret 2018. “Untuk data kependudukan ini sangat penting,” tegas Dedi. Dikarenakan pilkada serentak sudah di depan mata. Dedi tidak menginginkan pilkada serentak terkendala karena data kependudukan yang tidak valid.



Karena itu Dedi menegaskan kepada seluruh camat yang ada di Kota Cirebon bersama dengan Disdukcapil melakukan pendataan warga, termasuk anak-anak muda yang sudah berusia 17 tahun tapi belum memiliki KTP elektronik. Untuk mereka proses percepatan pencetakan KTP elektronik juga harus segera dilakukan.

Tidak hanya itu, Dedi pun meminta agar seluruh pihak bisa bersama-sama menyukseskan pilkada serentak 2018 ini. “Sehingga tingkat partisipasi pemilih bisa tinggi. Khususnya pemilih pemula,” ungkap Dedi.

Selanjutnya kepada setiap ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Dedi kembali menekankan kepada mereka untuk bersikap netral. Kalaupun ada pilihan politik, harus disimpan kuat dalam hati. Dengan bersikap netral dan profesional, maka setiap

ASN akan tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.



Pada briefing staff tersebut juga Pjs Wali Kota Cirebon akan segera mengisi kekosongan pejabat Lurah Drajat. Kekosongan tersebut menurut Dedi sangat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Karenanya dalam waktu yang tidak terlalu lalu, kekosongan Lurah Drajat akan segera diisi.

Sementara itu Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Sanusi, S.Sos, mengungkapkan jika saat ini ada 1.960 an pelajar tingkat SMA dan SMK di Kota Cirebon yang belum memiliki KTP elektronik. “Mereka sebenarnya sudah wajib memiliki KTP elektronik tapi belum memilikinya,” ungkap Sanusi. Karena itu mereka akan segera melakukan perekaman dan ditargetkan semuanya bisa mengikuti pilkada serentak maupun pilpres 2019 mendatang. “Sedangkan untuk stok blangko masih aman, kalau kurang, kita bisa minta lagi,” ungkap Sanusi.

## SEMUA PROYEK DI KOTA CIREBON DALAM PENGAWASAN TP4D



CIREBON- Pjs Wali Kota Cirebon instruksikan agar semua proyek strategis di Kota Cirebon diawasi melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Esok, Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri akan ditandatangani.

“Semua proyek program di Kota Cirebon akan melibatkan TP4D,” tegas Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, Senin, 05 Maret 2018. Untuk itu, esok, Selasa, 6 Maret 2018, akan dilakukan MoU antara Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dengan seluruh pimpinan perangkat daerah yang ada di Kota Cirebon. “Dasarnya MoU itu,” ungkap Dedi.



Jika telah ada MoU, maka Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mulai melakukan pengawalan terhadap sejumlah proyek strategis yang ada di Kota Cirebon. Pengawalan dimulai dari hulu hingga hilir, yaitu dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Pengawalan TP4D ini dilakukan agar seluruh proyek yang ada di Kota Cirebon bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan sejak awal.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Cirebon, Arifin Hamid, SH, MH, mengungkapkan jika mereka siap untuk melakukan pengawalan terhadap proyek-proyek yang dibangun di Kota Cirebon. “Saat ini kami sudah komunikasikan dengan pimpinan daerah dan kami siap untuk mengawal dan membantu program pemerintah,” tegas Arifin.

## MOU PENDAMPINGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA CIREBON DENGAN KEJAKSAAN NEGERI CIREBON



CIREBON- Sebagai upaya preventif pencegahan korupsi, Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ditandatangani. Selanjutnya masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk mengagendakan pertemuan dengan TP4D yang dibentuk oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Pjs Wali Kota Cirebon, Dr H Dedi Taufik, M.Si, dengan kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Arifin Hamid SH, MH, di ruang Adipura Balaikota Cirebon, Selasa, 06 Maret 2018. Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, mengungkapkan jika saat ini merupakan zaman transparansi. “Zaman now adalah zaman transparansi,zaman keterbukaan,” ungkap Dedi. Masyarakat berhak untuk mengetahui Program Pemerintah Daerah yang dapat membawa perubahan ke arah positif. Hal ini bertujuan agar Masyarakat juga merasakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka.



Namun dalam setiap pelaksanaan pembangunan, tentu ada saja kendala yang bisa dihadapi. Karena itu MoU dengan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ini ditandatangani. “MoU ini sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam setiap pelaksanaan proyek yang ada di Kota Cirebon,” katanya. Selain itu pelaksana proyek juga bisa berkonsultasi dengan kejaksaan jika menemukan adanya hambatan maupun kendala dalam pembangunan.

MoU ini juga merupakan amanat dari Inpres No 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasca ditandatanganinya MoU ini, maka Dedi mempersilahkan kepada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk berkoordinasi dan meminta pendampingan dari Kejaksaan Negeri. “MoU ini sebagai bentuk pendampingan bidang hukum. Jika ada keraguan, bisa sharing dengan Kejari,” ungkap Dedi.



Selanjutnya Dedi kembali menekankan agar setiap satuan kerja perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk saling bekerja sama dan berkoordinasi. Khususnya dalam pelaksanaan setiap program pembangunan yang ada di Kota Cirebon. “Dengan kerjasama dan kebersamaan, saya yakin semua program bisa sukses. Baik dalam penyelenggaraan maupun administrasi,” ungkap Dedi.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Cirebon, Arifin Hamid, SH, MH, menyambut baik penandatanganan MoU dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Selanjutnya Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) nanti akan melakukan pendampingan hukum terhadap permasalahan kegiatan yang ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Masalah proyek sering kali menjadi masalah hukum,” ungkap Arifin. Karena itu TP4D akan membantu menangani konsultasi dan pendampingan pada setiap pelaksanaan proyek.

Hanya saja Arifin mengakui jika mereka mengalami kendala dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk TP4D saat ini terdiri dari 10 orang yang dipimpin oleh Kasi Intel. Untuk itu, selain TP4D pihaknya juga akan memungsikan peran Datum. “MoU ini sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah daerah Kota Cirebon dengan Kejari,” ungkap Arifin.

## DENGAN KERJASAMA, PROGRAM PTSL DI KOTA CIREBON BISA MENCAPAI TARGET



CIREBON- Semua komponen terkait diminta ikut menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL). Program yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo tersebut harus didukung semua pihak.

Hal tersebut diungkapkan Pjs Wali Kota Cirebon, DR. H. Dedi Taufik, M. Si, saat acara Pengangkatan Sumpah Panitia Ajudikasi PTSL di Kantor Pertanahan Kota Cirebon sekaligus ekspos mengenai PTSL di Kota Cirebon, Selasa, 6 Maret 2018. "PTSL merupakan program presiden yang harus dilaksanakan bersama," tegas Dedi. Karena itu Dedi meminta agar semua pihak terkait, termasuk camat dan lurah yang ada di Kota Cirebon untuk juga bekerja keras menyukseskan program tersebut.



Terlebih kondisi masyarakat Kota Cirebon yang heterogen, membuat setiap pelaksanaan program tidaklah mudah. Namun Dedi tetap yakin jika pelaksanaan PTSL di Kota Cirebon bisa sukses selama semua bisa bekerja sama. "jangan lupakan sosialisasi kepada masyarakat, agar mereka paham," ungkap Dedi.

Dedi juga meminta agar pendataan dilakukan dengan teliti agar tidak sampai terjadi double sertifikat. Pematokan juga harus dikonkritkan sesuai dengan ukuran yang sebenarnya di lapangan. "Termasuk biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendaftaran sertifikat PTSL ini juga harus jelas," tegas Dedi.



Sementara itu Kepala BPN Kota Cirebon, Andi Kadandio Alepuddin, Ptnh, M.Si, mengungkapkan target PTSL di Kota Cirebon sebanyak 30.100 bidang tanah. "Kami akan menjalankan sejumlah strategi agar program PTSL di Kota Cirebon sukses dan sesuai target," kata Andi.

Diantaranya dengan membentuk kelompok kerja (pokja), membentuk kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan (pokmasdartibnah), gerakan pemasangan tanda batas seluruh Kota Cirebon secara serentak, hingga menyiapkan media center PTSL. "pekan raya PTSL juga akan kami lakukan," ungkap Andi.

Mengenai sosialisasi, Andi menyatakan akan segera dilakukan di awal tahun ini, sehingga masyarakat bisa lebih paham tata cara pembuatan sertifikat melalui program ini. Sedangkan untuk biaya, Andi menyatakan maksimal hanya sebesar Rp 150 ribu rupiah. Bahkan untuk warga tidak mampu, biaya tersebut menurut Andi bisa digratiskan.

## **PJS WALI KOTA: PERUMAHAN DI BANTARAN SUNGAI TURUNKAN FUNGSI SUNGAI**

CIREBON- Perumahan yang berdiri di bantaran sungai menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Cirebon. Pembangunan rumah tersebut menurunkan kondisi sungai.

Hal tersebut diungkapkan Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, dalam Rapat Teknis Penanggulangan Banjir di Wilayah Cirebon-Kuningan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, Rabu, 07 Maret 2018. “Karakteristik Kota Cirebon ini sangat dekat dengan kehidupan sungai dan laut,” ungkap Dedi. Kondisi tersebut justru dimanfaatkan warga untuk membangun rumah-rumah mereka dengan memanfaatkan daerah aliran sungai (DAS). Akibatnya, fungsi sungai pun menurun. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya sampah rumah tangga yang dihasilkan dan dibuang ke sungai.



Dijelaskan Dedi, Kota Cirebon memiliki 4 kali besar yang berfungsi sebagai flood control atau pengendali banjir. Masing-masing Kali Jaga, Kali Kesunean, Kali Kedungpane dan Kali Sukalila. Seluruh kali tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini BBWS Cimanuk Cisanggarung. Semua kali tersebut mengalir ke utara dan bermuara di Laut Jawa. “Keempat kali tersebut juga dapat diklasifikasikan sebagai saluran pembuang akhir saluran drainase,” ungkap Dedi.

Saluran drainase di Kota Cirebon pada umumnya juga memanfaatkan sungai-sungai kecil yang ada sebagai saluran primer atau sekunder. Sungai-sungai kecil tersebut mengalir secara gravitasi dengan sistem gabungan antara air hujan dan limbah rumah tangga. “Tidak ditemui sistem pompanisasi maupun kolam yang berfungsi sebagai tandon air atau kolam retensi,” ungkap Dedi. Padahal kolam retensi tersebut berguna untuk menahan atau memperlambat aliran air sungai ke hilir.



Untuk itu ke depannya, lanjut Dedi, direncanakan sejumlah langkah untuk penanggulangan banjir di Kota Cirebon. Mulai dari membersihkan sedimen, memungsikan kembali gorong-gorong yang ada, mengganti grill atau manhole yang sesuai dengan peruntukannya, normalisasi saluran dan air, serta peninggian pintu air dan pembuatan stasiun pompa. Sedangkan untuk jangka panjang, penanggulangan banjir di Kota Cirebon bisa dilakukan dengan pembangunan kolam retensi atau embung, penetapan garis sempadan sungai pantai, operasi dan pemeliharaan, termasuk dengan pengelolaan persampahan bersama-sama.

## PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON AJUKAN HIBAH UNTUK KAWASAN BIMA



CIREBON- Untuk meningkatkan status, Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengajukan hibah kepada pemerintah pusat untuk Stadion Bima dan kawasannya yang sekarang berstatus pinjam pakai. Melalui hibah, pengelolaan kawasan Bima diyakini bisa lebih baik untuk warga Kota Cirebon.

“Kawasan Bima ini luasnya sekitar 16 hektar. Sudah dilakukan pinjam pakai sejak Agustus 2016 lalu hingga 2019 mendatang,” ungkap Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, Rabu sore, 8 Maret 2018. Saat ini Stadion Bima sendiri sudah ditata. Melalui alokasi dana dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 9,3 miliar, Stadion Bima saat ini sudah direhabilitasi. Selain itu pada PON lalu, Pemprov Jabar mengalokasikan dana sebesar Rp 1,4 miliar untuk pembangunan sarana jalan dan penerangan jalan umum. Sejumlah spot olahraga juga sudah dibangun di Kawasan Bima. “Kawasan Bima juga sebagai ruang terbuka hijau yang multifungsi,” ungkap Dedi.



Agar pengelolaan Stadion Bima dan kawasannya lebih optimal, pemerintah Daerah Kota Cirebon pun mengajukan permohonan hibah kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI. Terlebih selama ini stadion Bima dan seluruh kawasan di sekitarnya sudah menjadi ikon dari masyarakat Kota Cirebon. “Supaya tertib adminitrasi, kita mohonkan ke depan untuk bisa dihibahkan ke Pemerintah Daerah Kota Cirebon,” ungkap Dedi. Jika sudah menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Cirebon, maka penataan kawasan Bima bisa dilakukan lebih baik, lebih aman dan nyaman untuk semua masyarakat Kota Cirebon.

Sementara itu Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Dedi Syarif Usman, mengapresiasi atas pemanfaatan aset yang dipinjam pakaikan kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon . “Kami apresiasi pemanfaatannya. Dari sebelumnya tidak tertata dan terurus, kini tertata rapih. Pengamanan juga sangat baik,” ungkap Usman. Bahkan Stadion Bima dan kawasannya saat ini berfungsi sebagai ruang terbuka hijau sekaligus sarana olahraga keluarga bagi masyarakat Kota Cirebon.



Untuk saat ini, lanjut Usman, permohonan hibah dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon mereka terima. “Karena nilainya cukup besar, mungkin bernilai Rp 100 miliar lebih, ini harus terlebih dahulu diusulkan ke presiden,” ungkap Usman. Namun pihaknya terlebih dahulu harus bisa meyakinkan Menteri Keuangan jika manfaat Stadion Bima dan kawasannya akan sangat bermanfaat jika dipakai atau digunakan secara permanen oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

## PJS WALI KOTA CIREBON PERINTAHKAN DAPUR UMUM HARUS DIBANGUN DEKAT LOKASI BANJIR



CIREBON- Pjs Wali Kota Cirebon meminta agar dapur umum selalu siap selama musim penghujan. Pembangunan lokasi dapur umum pun harus berdekatan dengan lokasi banjir.

Hal tersebut diungkapkan Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, setelah meninjau dapur umum yang dibangun di kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPA) Kota Cirebon, Minggu, 11 Maret 2018. “Jangan sampai ada masyarakat yang terkena banjir mengalami kelaparan,” tegas Dedi.



Kondisi tersebut ditemukan saat Dedi melakukan peninjauan korban banjir di Suradinaya, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon semalam. Sekitar pukul 01.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB warga yang diterjang banjir mengalami kelaparan karena kedinginan dan belum mendapatkan bantuan apa pun. Akhirnya bubur kacang pun diberikan sebagai bantuan awal agar warga tidak mengalami kelaparan. Dedi pun selanjutnya memerintahkan agar dapur umum segera dibangun.

Namun karena dapur umum masih dibangun di DSPPA, Dedi pun meminta agar ke depannya dapur umum dibangun di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan lokasi banjir. Sehingga bisa dijangkau warga dengan mudah. “Memudahkan pula untuk melakukan koordinasi dan distribusi,” ungkap Dedi.



Sementara itu Kepala DSPPA Kota Cirebon, H. Jamaludin, S.sos, mengungkapkan dibangunnya dapur umum di kantor DSPPA Kota Cirebon dikarenakan di tempat tersebut peralatannya lebih lengkap. “Selain itu kami juga belum menemukan lokasi yang tepat untuk dibangunnya dapur umum tersebut,” ungkap Jamal. Namun Jamal mengaku siap untuk menyiapkan dapur umum di tempat yang berdekatan dengan lokasi banjir.

Selanjutnya Jamal menambahkan jika seluruh korban banjir sudah mendapatkan bantuan makanan. “Pertama bantuan dari Pa Wali berupa bubur kacang,” ungkap Jamal. Tadi pagi mereka juga sudah menyiapkan 150 nasi bungkus. “Total dari jam 8 pagi hingga jam setengah 4 ini kami sudah berhasil memasak sekitar 360 bungkus nasi,” ungkap Jamal.

Nasi bungkus tersebut dibagikan ke RT 02 RW 06 Suradinaya Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. “untuk yang di Kalijaga, belum bisa difasilitasi, baru di Suradinaya,” ungkap Jamal. Selain itu setiap warga yang mengalami kebanjiran juga mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 50 ribu/lima hari untuk satu orang.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Penanggulangan Bencana Alam (KPBA) Kota Cirebon, Suradinaya Utara Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon kembali diterjang banjir. Air mulai masuk ke rumah warga pada Sabtu, 10 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB. Penyebabnya, meluapnya aliran sungai kanal banjir di Kota Cirebon akibat intensitas hujan yang tinggi. Akibatnya rumah warga terendam banjir dan 96 KK atau 384 jiwa terkena dampak banjir tersebut. Bahkan ada dua lansia yang akhirnya dibawa ke rumah sakit karena kondisinya sudah tidak sehat.

## 50 ORANG WARGA KOTA CIREBON DAPATKAN SERTIFIKAT TANAH



CIREBON- Sebanyak 50 warga Kota Cirebon mendapatkan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 3 ribu warga yang berasal dari Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka hari ini mendapatkan sertifikat tanah langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Penyerahan sertifikat tanah melalui program PTSL tersebut dilakukan di The Radiant, Cirebon. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan warga Kota Cirebon. Siti Aisah dan Desi Endiyarti, dua warga Kota Cirebon yang berkesempatan menerima sertifikat tanah langsung dari Presiden Joko Widodo.



Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo meminta agar warga yang sudah mendapatkan sertifikat tanah untuk menjaga baik-baik sertifikatnya. “Tolong diplastiki, difoto copy, biar tidak cepat rusak,” pinta Jokowi. Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta agar warga benar-benar berhitung jika ingin mengagunkan atau menggadaikan sertifikat tanah tersebut. “Dihitung betul-betul, sanggup tidak mencicilnya. Supaya sertifikat yang ada tidak hilang,” ungkap Jokowi.



Selanjutnya Jokowi juga memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Sofyan Djalil, untuk memperbanyak pembuatan sertifikat untuk masyarakat. Pada 2017 lalu ditargetkan 5 juta sertifikat keluar dari BPN. Tahun ini ditargetkan 7 juta sertifikat dan pada 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat yang dikeluarkan BPN. Di Jabar, 2023 ditargetkan seluruh sertifikat sudah harus rampung. “Jika target tidak dicapai, maka pilihannya hanya dua, diganti atau dicopot,” ungkap Jokowi.



Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Sofyan Djalil, mengungkapkan jika sebenarnya ada 9.810 sertifikat yang dibagikan untuk warga Kota dan Kabupaten Cirebon, kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu. “Namun yang hadir disini sebanyak 3 ribu. Sedangkan sisanya didistribusikan melalui BPN di masing-masing daerah,” ungkap Sofyan.

Jumlah tersebut, lanjut Sofyan, merupakan bagian dari 592 ribu sertifikat yang diprogramkan di Jabar pada 2017 lalu. Selanjutnya seluruh pembuatan sertifikat di Jabar mencapai 1.260.000 pada 2023 mendatang.



Sementara itu Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, menyambut baik penyerahan sertifikat tanah untuk warga Kota Cirebon. “Karena ini merupakan legalitas atas tanah yang dimiliki oleh warga,” kata Dedi. Dengan legalitas tersebut, warga Kota Cirebon menjadi lebih terjamin atas kepemilikan tanah mereka. Selain itu, sertifikat yang dibagikan juga bisa meningkatkan perekonomian warga Kota Cirebon.

## **AGAR PENYALURAN LEBIH CEPAT, DIBANGUN DUA POSKO DAPUR UMUM DI DEKAT LOKASI BANJIR**



Pemerintah Daerah Kota Cirebon membuat Dapur Umum (DU) di kawasan Gunung Sari Trade Centre (GTC) dan Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti untuk membantu korban banjir, Minggu (11/3) malam. Pembuatan DU di kawasan GTC dan Kalijaga dilakukan karena dekat dengan lokasi banjir terutama daerah Pusat Kota Cirebon dan Wilayah Selatan Kota Cirebon yang rawan bencana.

Diharapkan dengan semakin dekat DU maka penyaluran dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Hal ini sesuai instruksi PJS Wali Kota Cirebon, DR. H. Dedi Taufik, MSi terkait pengadaan dapur umum dekat lokasi banjir atau bencana tapi aman. Dedi bersama rombongan melihat secara langsung pemberian makanan ke korban banjir.

“Marilah kita semua tetap waspada dengan cuaca yang sulit diprediksi. Kami sudah berusaha menangani korban banjir secara cepat dan tepat sasaran terutama evakuasi, pengobatan dan makanan tentunya. Alhamdulillah kita sudah membangun DU di GTC akan menjadi posko dan Kelurahan Kalijaga,” ungkap Dedi ketika melakukan peninjauan di DU GTC, Minggu (11/3) malam.



Dedi menambahkan pihaknya sudah melakukan evakuasi 126 kepala keluarga (KK) pada banjir Minggu malam. Korban sudah mendapat penanganan tempat yang nyaman dan aman di GTC, pengobatan dan makanan dari DU. Penanganan cepat dilakukan agar membantu meringankan beban korban bencana.

“Banjir kali ini ternyata ada pengembangan titik bencana. Baru saja saya dengan tim membantu banjir di Jalan Kembang. Ini berarti banjir bukan hanya dekat areal sungai tapi juga melebar,” kata Dedi.

Pada kunjungan ke Jalan Kembang, PJS Wali Kota Cirebon sempat membantu korban ibu hamil yang hendak melahirkan. Dedi datang ke lokasi secara langsung mengevakuasi ibu hamil tersebut hingga membawa masuk ke mobil ambulan. Ibu hamil tersebut tidak mengira rumahnya bakal menjadi korban banjir.

“Kita semua sudah menetapkan Kota Cirebon posisi Siaga sejak Bulan November hingga Mei mendatang. Artinya, kita semua harus siaga menghadapi keadaan ini,” ujar Dedi.

Terkait penanganan banjir, lanjut Dedi, pihaknya akan bekerjasama dengan semua pihak terutama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Di Kota Cirebon mengalir empat sungai besar dan 76 sub sistem yang harus diperbaiki atau dipantau.

## KIRAB BUDAYA CAP GO MEH DI KOTA CIREBON BISA JADI TUJUAN WISATA KELAS DUNIA



CIREBON-Pjs Wali Kota Cirebon berharap Kirab Budaya Cap Go Meh di Kota Cirebon bisa menjadi destinasi wisata kelas dunia. Keberagaman yang ada di Kota Cirebon bersatu dalam Kirab Budaya Cap Go Meh.

Hal tersebut diungkapkan Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, sebelum melepas kirab budaya Cap Go Meh dari Vihara Dewi Welas Asih menyusuri sejumlah jalan di Kota Cirebon, Jumat, 02 Maret 2018. “Kami sangat mendukung kegiatan yang telah digagas panitia pelaksana,” ungkap Dedi. Bahkan Pemerintah Daerah Kota Cirebon juga siap untuk memfasilitasi agar Kirab Budaya Cap Go Meh yang diselenggarakan setiap tahun ini menjadi destinasi tujuan wisata kelas dunia.

Karenanya Dedi berharap kepada seluruh seniman, budayawan, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Kota Cirebon bisa menyukseskan kegiatan tersebut secara positif. Apalagi, Kirab Cap Go Meh yang dilakukan setiap tahun memperlihatkan persatuan dari multi etnis yang ada di Kota Cirebon. “Kita lihat tadi, Kirab Cap Go Meh ini mempersatukan etnis Tionghoa dengan nelayan pesisir. Mempersatukan seluruh warga yang ada di Kota Cirebon,” ungkap Dedi. Dengan potensi yang sudah ada, bukan hal yang mustahil jika tahun berikutnya kirab budaya Cap Go Meh ini bisa menjadi tujuan wisata kelas dunia.



Sementara itu Wakil Ketua Panitia Kirab Budaya, Iwan Santoro, menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara Kirab Budaya tersebut. “Kami pun berharap kirab budaya ini bisa berjalan dengan lancar dan aman,” ungkap Iwan. Bahkan lebih jauh Iwan juga berharap jika Kota Cirebon mampu menarik perhatian

wisatawan dari luar daerah maupun luar negeri dengan keberagaman budaya dan etnis yang dimiliki. “ini adalah budaya leluhur yang harus kita lestarikan dalam satu wadah NKRI,” ungkap Iwan.

## PJS WALI KOTA CIREBON AJAK SISWA JAGA KESEHATAN



CIREBON- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah upaya untuk memberdayakan siswa, guru dan masyarakat lingkungan untuk berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat.

Demikian diungkapkan PJS Wali Kota Cirebon, DR. H. Dedi Taufik, MSi ketika memberikan pengarahan pada upacara bendera di SMPN 1 Cirebon, Senin (12/3). Dedi mengatakan penerapan PHBS di sekolah merupakan kebutuhan mutlak seiring munculnya berbagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah.

“Saya memberikan motivasi pada generasi bangsa kita. Pendidikan saat ini menjadi prioritas pembangunan di Indonesia. Saya memberikan motivasi PHBS terutama kepada siswa,” ungkap Dedi.



Dedi menambahkan sekolah selain sebagai tempat menuntut ilmu diharapkan dapat menjadi agen perubahan perilaku yang mendukung kesehatan. Berbagai pengalaman dapat diterapkan dengan harapan akan dapat diikuti sampai menjadi kebiasaan selanjutnya menjadi budaya yang baik.

PHBS merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh siswa, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran. Secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Penerapan PHBS ini dapat dilakukan melalui pendekatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

“Ada delapan indikator PHBS yang harus diterapkan. Yaitu cuci tangan pake sabun dan air mengalir. Jajan di kantin sekolah yang sehat dan membuang sampah pada tempat sampah yang terpilah,” ujar Dedi.



Selain itu indikator lainnya mengikuti kegiatan olahraga, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan, menggunakan jamban sehat. Memberantas jentik nyamuk dan tidak merokok di sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Drs. H. Jaja Sulaeman, MPd mengatakan pihaknya merespon dengan berbagai harapan PJS Wali Kota Cirebon di sekolah. “Kami tentu akan melaksanakan dengan menyosialisasikan ke sekolah lainnya,” tandasnya.

## PERLU DILAKUKAN NORMALISASI, SUNGAI KEDUNG PANE MILIKI SEDIMENTASI TINGGI



CIREBON- Sungai Kedung Pane memiliki sedimentasi cukup tinggi sehingga membuat wilayah Kota Cirebon dan perbatasan Kabupaten Cirebon mengalami banjir. Tingginya sedimentasi membuat jumlah debit air yang ditampung sangat terbatas sehingga melimpah keluar sungai.

Hal ini terungkap dari rapat bersama Jajaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon, Selasa (13/3). Hadir dalam acara tersebut PJS Wali Kota Cirebon, DR H. Dedi Taufik, MSi, Kepala BBWS Cimanuk (BBWS), Bob Arthur Lombogia, ST, M.Si dan Kepala PSDA Provinsi Jabar, Ir. Nanan Nasuha Djuhri, Sp 1.

“Berdasarkan hasil survey kami di sungai Kedung Pane terdapat sedimentasi sangat tinggi. Akibatnya air tidak tertampung membuat sebagian besar air melimpah ke Jalan DR Cipto Mangunkusumo dan sekitarnya,” ungkap Dedi dalam rapat tersebut.



Dedi menambahkan persoalan bertambah ketika curah hujan sangat tinggi pada Bulan Maret 2018 ini. Sedimentasi tersebut harus mendapat penanganan serius dengan normalisasi sungai Kedung Pane dan lainnya. Normalisasi akan menambah debit yang dapat ditampung sungai Kedung Pane sehingga tidak akan melimpah.

“Kami berharap semua komponen dapat berbagai tugas sesuai tupoksi masing-masing terutama BBWS, PSDA Provinsi Jabar dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Cirebon. Pengerukan akan dilakukan segera supaya penyelesaian banjir cepat selesai,” kata Dedi.

Persoalan air melimpah di kawasan Jalan DR Cipto Mangunkusumo terus menerus terjadi selama sedimentasi dan curah hujan masih tinggi. Hal ini harus dilakukan antisipasi oleh semua pihak termasuk masyarakat sekitar ikut membantu. Harus ada langkah komperhensif dan sinergi antara pemerintah serta masyarakat.

“Kita juga harus waspada berdasarkan prakiraan pertengahan Bulan Maret ini akan menjadi puncak curah hujan,” tandasnya.



Sementara Bob Arthur mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanggulangan banjir termasuk pengerukan sedimentasi. “Kondisi air melimpah bukan hanya di Kota Cirebon. Saat ini sebagian wilayah Kabupaten Cirebon memang terdampak banjir karena curah hujan tinggi. Bahkan wilayah Plered yang lokasinya tinggi terkena banjir,” kata Bob.

Pihaknya, lanjut Bob, siap melakukan berbagai upaya sesuai kewenangan untuk melakukan normalisasi sungai yang ada. BBWS akan melakukan mapping bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat untuk menentukan lokasi pengerjaannya.

Kepala PSDA Provinsi Jabar, Nana mengatakan pihaknya merespon positif terhadap PJS Wali Kota Cirebon yang melakukan rapat gabungan antisipasi banjir bersama. Hasil rapat sementara dihasilkan adanya sumbatan pada beberapa titik sungai.

“Saat ini kami akan mengupayakan penanganan jangka pendek agar mengurangi adanya sumbatan di sungai. Kalau jangka panjang harus komperhensif karena pastinya melibatkan semua pihak dan beberapa wilayah kabupaten/kota,” tandasnya.

## KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN DIBAHAS DALAM MUSRENBANG 2019



CIREBON- Ketimpangan pembangunan dan kemiskinan masih menjadi pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Musrenbang RKPD) Tahun Perencanaan 2019. Potensi-potensi pendapatan juga harus dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Cirebon.

Ketimpangan pembangunan tersebut terungkap dalam penyelenggaraan Musrenbang yang bertema Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Daerah Melalui Sinergitas Perencanaan yang Akurat dan Akuntabel Dalam Menunjang Peningkatan Pelayanan Publik di Hotel Prima Cirebon, Rabu, 14 Maret 2018. “Berdasarkan pokok-pokok pikiran dari DPRD disebutkan ada ketidaksesuaian, gagal fokus,” ungkap Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si.



Dimana terjadi ketimpangan pembangunan di Kota Cirebon. Selama ini, pembangunan lebih banyak berada di pusat kota. Sedangkan di daerah pinggiran, diantaranya di wilayah selatan minim sentuhan pembangunan. “Karenanya kita akan konsen dengan penuntasan masalah kemiskinan,” ungkap Dedi. Diantaranya dengan menggiatkan pembangunan di wilayah pinggiran.

Karena itu, musrenbang ini penting untuk menyelaraskan, mengklarifikasi usulan kegiatan, mempertajam target kinerja serta menyepakati prioritas rencana kerja pemerintah daerah Kota Cirebon pada 2019 mendatang. “Ketidaksesuaian dan gagal fokus, jangan sampai terulang lagi pada 2019 mendatang,” ungkap Dedi.

Selanjutnya untuk penuntasan kemiskinan Dedi mengungkapkan harus segera didata peluang kerja serta jumlah pencari kerja di Kota Cirebon. Pendataan ini untuk mengetahui berapa banyak pengangguran di Kota Cirebon. Data pengangguran ini pun penting, karena juga terkait erat dengan kasus kemiskinan di Kota Cirebon. “Pembangunan, kemiskinan, gender, ini masalah yang akan kita pecahkan bersama di Kota Cirebon,” ungkap Dedi.



Menyinggung potensi daerah yang dimiliki Kota Cirebon, Dedi mengungkapkan selama ini potensi pendapatan di Kota Cirebon banyak didapatkan dari pajak hotel, restoran, parkir dan sejumlah sumber pendapatan lainnya. “Namun semua harus ditata dan digali lagi,” ungkap Dedi. Diantara penataan parkir, baik di dalam gedung maupun di badan jalan. Dengan penataan, maka bisa didapatkan berapa sebenarnya angka yang bisa dihasilkan dari sektor parkir. Menyinggung keberatan sejumlah pengelola restoran dengan pemasangan tapping box, Dedi mengaku akan segera melakukan dialog untuk mengetahui alasannya. “Nanti kita akan kumpulkan lagi OPD terkait yang terlibat dalam pengumpulan pendapatan di Kota Cirebon,” ungkap Dedi.

## **PENYELENGGARAN NEGARA DI KOTA CIREBON DIMINTA SEGERA LAPORKAN HARTA KEKAYAAN.**



CIREBON- Setiap penyelenggara negara diharuskan untuk melaporkan harta kekayaan yang mereka miliki. Pendaftaran dipermudah dengan sistem online yang sudah diterapkan.

Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H Dedi Taufik, M.Si, meminta agar setiap penyelenggara negara, baik itu eksekutif maupun legislatif di Kota Cirebon untuk secepatnya melaporkan harta kekayaan yang mereka miliki. “Tadi berdasarkan paparan dari KPK, baru ada 3 orang dari eksekutif yang melaporkan harta kekayaan mereka,” ungkap Dedi. Padahal jumlahnya mencapai 60 orang. Sedangkan untuk legislatif, dalam hal ini anggota DPRD Kota Cirebon tercatat sebanyak 32 orang yang belum melaporkan harta kekayaan mereka.



Karena itu, Dedi meminta agar waktu dua minggu yang diberikan oleh KPK agar dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi mereka untuk segera membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Khusus untuk eksekutif, perkembangannya ada pada Badan Kepegawaian. “Nanti kita akan koordinasikan secepatnya. Dua minggu mendatang sudah harus ada perubahan,” tegas Dedi.

Sementara itu Asep Rahmat Suganda, Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Terintegrasi dari KPK menjelaskan jika berdasarkan UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih disebutkan kewajiban penyelenggara negara baik itu eksekutif maupun legislatif, dari tingkat pusat hingga kota dan kabupaten harus melaporkan harta kekayaan mereka. “tidak ada sanksi pidana, adanya sanksi administratif,” ungkap Asep. Sanksi itu pun diberikan oleh pimpinan mereka, dalam hal ini

Wali Kota Cirebon. “Karena itu kami harapkan Pak wali bisa memberikan sanksi kepada penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaan mereka,” ungkap Asep.

Untuk legislatif yang belum memberikan LHKPN mereka sebanyak 32 orang sedangkan eksekutif dari 60 orang baru 3 orang yang melaporkan harta kekayaan mereka. “Kami minta dua minggu setelah hari ini, segera melaporkan,” ungkap Asep. Asep mengaku pihaknya akan meminta koordinator di Jabar untuk segera memonitor kepatuhan terhadap LHKPN di Kota Cirebon ini. “Pelaporan ini sudah semakin mudah, karena bisa online,” ungkap Asep.



Tidak hanya minimnya pelaporan LHKPN, laporan penerimaan gratifikasi pun tidak ada di Kota Cirebon. “Kemungkinannya dua, bisa memang tidak ada gratifikasi atau ada tapi tidak dilaporkan,” ungkap Asep. Padahal berdasarkan pasal 12b tentang Ketentuan Pidana, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan tugas mereka, terkena pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Ada pun dendanya Rp 150 juta hingga Rp 1 miliar. Sedangkan pada pasal 12c menyebutkan jika seluruh penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima selama masa 30 hari setelah diterima. Jika tidak melaporkan, maka akan dikenakan pidana gratifikasi. “Pelaporan gratifikasi juga bisa dilakukan secara online,” ungkap Asep. Dalam undang-undang, lanjut Asep, tidak disebutkan jumlah minimum. Ini berarti semua gratifikasi yang diterima terkait dengan jabatan sebagai penyelenggara negara, wajib segera dilaporkan ke KPK.

## MEMBENTUK KARAKTER TANGGUH, PJS KETUA PKK AJAK KADER IKUTI PELATIHAN



CIREBON-Menghadapi era globalisasi, kader PKK dan Dharma Wanita Kota Cirebon harus memiliki karakter yang tangguh. Kader tangguh diharapkan mampu menghadapi berbagai persoalan yang semakin berat. Demikian diungkapkan PJS Ketua PKK Kota Cirebon, DR Hj. Ira Irawati M dalam Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Pengembangan Kepribadian yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Cirebon, Selasa (13/3).

Ira mengatakan kegiatan pelatihan kepemimpinan diberikan dengan tujuan membantuk karakter kader PKK dan Dharma Wanita yang tangguh. “Karakter tangguh dapat memadukan konsep kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Yang nantinya dapat membentuk karakter diri kita menjadi tangguh. Hal ini untuk meningkat produktivitas sekaligus memberikan makna tersendiri bagi kehidupan kita,” ungkap Ira.



Ira menambahkan pelatihan ini bekerjasama dengan lembaga Emotional Spiritual Quotient (ESQ). Pelibatan lembaga ESQ agar kader dapat lebih baik lagi dalam bekerja atau berkarya. Materi yang didapat dalam kegiatan pelatihan dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. “Pelatihan diberikan sebagai bekal kepada para kader PKK dan Dharma Wanita yang sudah mau bekerja dengan tulus dan ikhlas untuk kemajuan di Kota Cirebon,” kata Ira.

Sementara salah satu kader Dharma Wanita, dr. Hj. Walyanah, MH., Kes., mengungkapkan, pelatihan yang melibatkan lembaga ESQ baru pertama yang digelar bersama tim PKK dan Dharma Wanita. Kegiatan dirasa cukup membantu memberikan pemahaman baru dalam melaksanakan tugasnya.

“Kami sangat berterima kasih kepada Ny. PJS Wali Kota Cirebon sekaligus PJS Ketua PKK terutama bagi saya pribadi. Karena adanya kegiatan yang baru seperti ini dapat memberikan pemahaman yang baru baik kepada kader PKK maupun Dharma Wanita di Kota Cirebon,” ujar Walyanah.

Walyanah juga menjelaskan kegiatan pelatihan ini merupakan nuansa baru di Kota Cirebon.



Dalam kegiatan pelatihan ini juga para kader PKK dan Dharma Wanita memberikan sumbangan ke korban banjir di Kota Cirebon. Secara simbolis bantuan diberikan Ketua Dharma Wanita, Wien Asep Dedi kepada Ira Irawati. Selanjutnya bantuan tersebut akan diberikan kepada 68 korban banjir yang ada di Kota Cirebon.

## MENGURANGI BEBAN SUNGAI, KAWASAN KOMERSIL DIMINTA BUAT BIOPORI



CIREBON- Antisipasi banjir di Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon meminta berbagai elemen terutama kawasan komersil membuat resapan air lebih banyak. Resapan berfungsi untuk menyimpan air sehingga tidak melimpah keluar sehingga terjadi banjir.

Menghadapi bahaya banjir terutama di kawasan Jalan DR Cipto Mangunkusumo, PJS Wali Kota Cirebon, DR. H. Dedi Taufik, MSi rapat bersama instansi terkait dan pengusaha di Rumah Dinas Walikota, Minggu (11/3). Dedi mengatakan penanganan cepat harus dilakukan termasuk untukantisipasi banjir. “Kami meminta untuk areal komersil di jalur utama Kota Cirebon wajib membuat resapan. Buatlah biopori yang banyak sehingga tanah yang ada ikut menyerap air mengalir. Kami melihat banyak bangunan komersil yang menutup seluruh tanahnya,” ungkap Dedi.

Dedi menambahkan resapan air sangat diperlukan sehingga air tidak secara keseluruhan mengalir ke sungai. Sungai yang dimiliki sekarang juga banyak diganggu oleh bangunan yang masuk ke daerah aliran sungai (DAS). Akibatnya sungai tidak dapat menampung apalagi bila ditambah dengan banyaknya sampah. Pantas bila kemudian bila hujan datang air cepat memenuhi saluran sehingga pada daerah padat dan rendah seperti Jalan DR Cipto Mangunkusumo terkena banjir. Pengadaan biopori diharapkan dapat membant mengurangi dampak banjir maupun kemarau.



Hal senada diungkapkan Asisten administrasi Perencanaan dan Pembangunan, Ir Yoyon Indrayana yang mengatakan sebagian besar lokasi usaha minim biopori. Padahal dahulu di kawasan Jalan DR Cipto Mangunkusumo menjadi daerah resapan. “Pelaku usaha harus ikut

berperan untuk membuat resapan atau biopori. Sisihkan lahan usaha untuk membuat resapan sehingga air tidak semua ke sungai,” ungkap Yoyon.

Yoyon menambahkan 40-60 persen dunia usaha harus memiliki biopori sehingga banjir dapat dikurangi. Selain itu pelaku usaha ikut membantu menangani banjir dengan membuat saluran tetap bersih. Kemudian membantu membersihkan saluran yang ada di sekitar lokasi tempat usahanya.

Dukungan diungkapkan General Manager Gramedia, Thomas untuk membuat biopori di kawasan dunai usaha. Pihaknya meminta Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang menginisiasi sehingga semua pelaku usaha melakukan hal sama.

“Kami sudah menerapkan syarat untuk membuat bangunan yang seperti diajukan oleh dinas terkait,” kata Thomas.



Sementara Komandan Kodim 0614 Kota Cirebon, Letkol Inf Heri Rustanto menyatakan perlu penanganan komferhensif melibatkan semua pihak menaganai persoalan banjir. Salah satunya adalah pemanfaatan air sehingga bukan menjadi bencana.

“Penanganan yang baik bukan hanya menyelamatkan warga ketika musim penghujan tapi juga musim kemarau. Caranya tentu salah satunya dengan pembuatan biopori seperti yang diungkapkan PJS Wali Kota Cirebon,” tandasnya.

## KEKOSONGAN JABATAN DI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON BISA SEGERA DIISI



CIREBON- Kekosongan jabatan terjadi di banyak jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Dengan izin dari Kementerian Dalam Negeri, kekosongan jabatan tersebut bisa segera diisi saat ini.

Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, menjelaskan jika untuk kekosongan sejumlah jabatan bisa segera diisi. “Untuk eselon dua, bisa dilakukan open bidding,” ungkap Dedi. Menurut Dedi, jabatan tidak boleh dibiarkan terlalu lama kosong, karena bisa berdampak pada terganggunya layanan kepada masyarakat.

Namun untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, pihaknya akan segera memanggil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon. “Nanti kita lihat dulu aturannya seperti apa,” ungkap Dedi. Termasuk dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri sebelum melakukan rotasi maupun mutasi.



Sementara itu Kepala BKPPD Kota Cirebon, H. Anwar Sanusi, S.Pd., M.Si, menjelaskan walaupun statusnya hanya sebagai pejabat sementara wali kota, namun tetap bisa melakukan mutasi. “Jadi Pjs ini tidak ada bedanya dengan wali kota. Cuma wali kota 5 tahun sementara Pjs sampai dengan ada yang definitif. Jadi sama,” ungkap Anwar. Karenanya jika Pjs hendak mengisi kekosongan jabatan yang ada saat ini menurut Anwar bisa dilakukan, namun terlebih dahulu harus ada izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Dijelaskan Anwar, karena adanya pilkada serentak, terjadi kekosongan sejumlah jabatan di daerah. “tidak hanya di Kota Cirebon,” ungkap Anwar. Namun di 174 kabupaten dan kota

yang menyelenggarakan pilkada serentak. Bahkan kekosongan jabatan mencapai lebih dari setahun. Ini dikarenakan, saat terpilih Oktober mendatang, kepala daerah yang baru tidak boleh melakukan mutasi dan rotasi 6 bulan setelah pelantikan. “berarti April tahun depan baru ada rotasi dan mutasi lagi,” ungkap Anwar.



Ada pun kekosongan jabatan yang ada di Kota Cirebon masing-masing jabatan eselon 2 sebanyak satu orang. “Mulai 1 April nanti Pak Dana Kartiman akan pensiun,” ungkap Anwar. Selanjutnya kekosongan di eselon 3 sebanyak 4 orang, eselon 3B sebanyak 6 orang, eselon 4A sebanyak 29 orang dan eselon 4B sebanyak 16 orang. Untuk kekosongan eselon 4A sebanyak 13 orang nanti bisa diambil dari UPTD Pendidikan yang dilikuidasi. “Kami juga sudah memberikan nota dinas kepada wali kota bahwa ada kekosongan jabatan untuk eselon 2,” ungkap Anwar.

## PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA CIREBON AKAN DIIDENTIFIKASI



CIREBON- Seluruh pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kota Cirebon akan segera diidentifikasi. Dinas terkait diminta saling bekerja sama untuk mengatasi permasalahan PKL di Kota Cirebon.

Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, menjelaskan jika permasalahan PKL yang ada di Kota Cirebon harus segera dituntaskan. “Diantaranya dengan melakukan langkah identifikasi terlebih dahulu terhadap mereka,” kata Dedi. Identifikasi maupun pendataan tersebut untuk mengetahui ada berapa banyak sebenarnya PKL yang ada di Kota Cirebon termasuk asal mereka. Dedi menekankan agar pendataan yang dilakukan kali ini dilakukan secara komprehensif. “Harus komprehensif, menyeluruh. Sehingga kita benar-benar mengetahui berapa sebenarnya jumlah PKL hingga kini,” ungkap Dedi.



Selanjutnya Dedi juga meminta agar shelter-shelter PKL yang sudah dibuatkan segera diisi. Seperti di kawasan Ciptomangunkusumo, alun-alun, BIJB dan Bima. “Dialog dengan mereka juga akan kita lakukan,” ungkap Dedi.

Sedangkan untuk dinas, Dedi mengaku akan segera memanggil dinas terkait yang selama ini mengurus PKL. “Termasuk Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) serta Satpol PP,” ungkap Dedi. Pemanggilan tersebut juga dalam rangka menuntaskan permasalahan PKL yang ada di Kota Cirebon. “Yang penting disini, kita bisa berhasil kalau ada kerja sama,” tegas Dedi.

Sementara itu Kepala DPKUKM Kota Cirebon, Ir. Hj. Yati Rohyati, menjelaskan jika jumlah PKL saat ini masih mengacu pada pendataan 2014 lalu. “Saat itu jumlah PKL terdata

sebanyak 2.841 pedagang,” ungkap Yati. Pada 2017 lalu, lanjut Yati, pendataan terhadap PKL belum dilakukan kembali.

DPKUKM Kota Cirebon kembali melakukan pendataan PKL pada 2018 ini. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan menempatkan pedagang pada beberapa titik shelter di wilayah Kota Cirebon. “Perlu diketahui, kami melakukan pendataan ini tanpa anggaran,” kata Yati. Yati pun berharap jika data PKL nantinya tidak lebih dari pendataan yang dilakukan 2014 lalu. “Jika lebih, kami minta Satpol PP untuk menertibkannya,” kata Yati.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Cirebon, Drs. Andi Armawan, mengungkapkan jika pihaknya selama ini mengalami kesulitan dalam menertibkan PKL yang ada di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Cirebon. “Karena kami tidak bisa membedakan mana pedagang yang sudah terdata dan masuk dalam binaan DPKUKM Kota Cirebon,” ungkap Andi.

## PJS WALI KOTA, BIJAKLAH GUNAKAN MEDIA SOSIAL.



CIREBON- Deklarasi dan ikrar anti hoax dilakukan bersama kepolisian, TNI dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Pjs Wali Kota Cirebon meminta agar setiap orang bijak menggunakan media sosial (medsos).

Deklarasi dan ikrar anti hoax digelar di Mako Brimob Detasemen C Polda Jabar, Jumat, 16 Maret 2018 dan dihadiri seluruh forum pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Cirebon. Turut hadir pula Danrem 063 Sunan Gunung Jati, Kolonel (Inf) Veri Sudijanto Sudin. "Ikrar ini sebagai bentuk sinergi pemerintah daerah dengan jajaran kepolisian dan TNI," ungkap Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si. Sekaligus sebagai dukungan pemerintah daerah untuk memerangi berita hoax yang muncul dalam kehidupan masyarakat.



Selanjutnya Dedi juga menyampaikan himbauan, baik untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun warga Kota Cirebon untuk bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. "Harus selektif dan cerdas," ungkap Dedi. Sebelum menyebarkan informasi terlebih dahulu melakukan cek dan ricek apakah informasi yang didapatkan itu benar atau tidak. Ini dikarenakan penyebaran hoax saat ini sudah bisa dijerat hukum. Yaitu pasal 28 ayat 2 Uu No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selama 6 tahun dan atau denda Rp 1 miliar. "Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kecerdasan penggunanya," tegas Dedi. Dengan begitu, penyebaran hoax tidak akan terjadi.



Sementara itu Danrem 063 Sunan Gunung Jati, Kolonel (Inf) Veri Sudijanto Sudin, mengungkapkan di era digital ini ada sebuah ungkapan yang bisa mematikan. “One click killer,” ungkap Veri. Yang artinya, satu kali saja ikut-ikutan menyebarkan informasi bohong atau hoax maka sama saja dengan menyakiti bahkan membunuh sesama. Karena itu, TNI juga berkomitmen untuk ikut menjaga stabilitas keamanan di wilayah Indonesia, khususnya di Cirebon. “Apabila mendapat berita tidak jelas, sebaiknya langsung dihapus,” tegas Veri.

## DEMI TINGKATKAN PELAYANAN, PEMKOT GENJOT SPIP DAN APIP MASUK KELAS 3



BANDUNG- Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan hasil kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan peningkatan kematangan Satuan Pengawas Intern Pemerintah (SPIP) masuk kelas tiga. Peningkatan dari kelas 2 tersebut agar kinerja pemerintah berjalan lebih baik.

Demikian diungkapkan PJS Wali Kota Cirebon, DR. H. Dedi Taufik, MSi usai mengikuti acara bincang pagi ini mengambil tema mengenai "Peningkatan Maturitas SPIP kelas 3 (terdefinisi) dan Kapabilitas APIP kelas 3 (terintegrasi) pada Pemda se-Provinsi Jawa Barat" yang dilaksanakan di Gedung Kantor BPKP Provinsi Jawa Barat Bandung, Senin (19/3).



Dedi mengatakan saat ini APIP dan SPIP Pemerintah Daerah Kota Cirebon masih berada pada kelas dua dan sudah 90 persen proses menuju ke kelas 3.

“Kami melakukan percepatan-percepatan kaitan dengan pemantauan dan pengendaliannya. Percepatan juga dilakukan dalam informasi, komunikasi dan lingkungan pengendalian maupun penilaian resiko,” ungkap Dedi.

Dedi menambahkan bahwa pihaknya sudah mengintruksikan Inspektur Kota Cirebon untuk merealisasikan langkah tersebut sehingga APIP dan SPIP masuk kelas tiga. Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan mencoba hingga akhir tahun untuk realisasinya.



Acara ini diawali dengan laporan penyelenggaraan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Imam Achmad Nugraha yang menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai evaluasi dalam meningkatkan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP diseluruh Pemda se-Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini juga menghadirkan pembicara Gubernur Jawa Barat, DR H. Ahmad Heryawan, Lc dan Kepala BPKP, Ardan Adiperdana. Dengan audiensi yang hadir sebanyak 21 Kepala Daerah dan seluruh Inspektur Daerah se-Provinsi Jabar.

Kegiatan dilaksanakan untuk melakukan percepatan SPIP kelas 3 (Skala 1-5) dan APIP kelas 3 (skala 1-5). Pemda se-Provinsi Jawa Barat sampai dengan saat ini baru 7 daerah mendapat hasil penilaian secara mandiri (self assesment) kelas 3. Dua daerah diantaranya sedang proses review BPKP Perwakilan Jabar, setelah hasil review dinilai masuk kelas 3 maka selanjutnya di Quality Assurance (QA) oleh BPKP Pusat untuk memastikan Pemda tersebut bisa diterima atau tidak mendapat penilaian leveling SPIP tersebut.

Demikian juga dengan penilaian Kapabilitas APIP saat ini dari 12 APIP yang telah melakukan penilaian mandiri dengan posisi kelas 3. Baru 1 APIP yang masuk proses QA oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya bila dianggap sesuai maka akan di review BPKP Pusat.



“Kedua kondisi diatas masih perlu kerja keras dan perlu dukungan komitmen dari Kepala Daerahnya, mengingat target Pemerintah Pusat sampai dengan tahun 2019 minimal 85% Pemda se-Jabar sudah masuk kelas 3.

untuk penilaian maturitas (kematangan) SPIP. Serta memberi contoh-contoh konkrit dalam membangun pengendalian dan meningkatkan kapabilitas APIP-nya,” tandas Kepala BPKP Ardan.

## **PJS WALI KOTA: PROYEK FISIK TIDAK BOLEH MENUMPUK DI AKHIR TAHUN**



CIREBON- Pjs Wali Kota Cirebon meminta agar pelaksanaan sejumlah proyek fisik yang sudah dianggarkan tidak boleh menumpuk di akhir tahun. Hingga kini belum satu pun dokumen lelang proyek fisik atau konstruksi yang masuk ke ULP.

Pjs Wali Kota Cirebon, Drs Dedi Taufik, M.Si, mengungkapkan jika dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sudah ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu anggaran pun sudah ketuk palu sejak lama. “harusnya tiap triwulan itu ada target proyek mana saja yang sudah dilelangkan sekaligus dikerjakan,” kata Dedi.

Dengan target yang ditetapkan tiap triwulan tersebut maka setiap proyek, terutama proyek konstruksi bisa berjalan sesuai dengan ketentuan. “Tidak menumpuk di akhir tahun,” tegas Dedi. Sehingga pada Desember, seluruh pengerjaan konstruksi sudah selesai dan tinggal proses administrasi yang harus diselesaikan.

Sementara itu Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa ULP Setda Kota Cirebon, Syaroni, ATD MT, menjelaskan jika saat ini sejumlah lelang memang sudah dilakukan. “Namun untuk lelang proyek atau fisik belum ada yang dilakukan,” ungkap Syaroni. Lelang, lanjut Syaroni terdiri dari pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya. Untuk lelang pengadaan barang, jasa konsultan dan jasa lainnya sedikitnya sudah ada 7 yang masuk.

Namun untuk lelang proyek konstruksi diakui Syaroni hingga kini belum ada yang masuk. “Seharusnya sudah bisa dilelang sejak Januari,” ungkapnya. Karena itu, lanjut Syaroni, mereka saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan jemput bola. Terutama di sejumlah SKPD yang memiliki proyek-proyek konstruksi. Namun hingga kini sistem jemput bola yang mereka lakukan belum membuahkan hasil.

Syaroni sendiri berharap agar lelang proyek konstruksi bisa dilakukan sebelum Agustus atau September. “Berdasarkan tahun sebelumnya, lelang yang dilakukan setelah September bahkan Oktober membuat proyek konstruksi menumpuk di akhir tahun,” ungkap Syaroni. Sehingga akhirnya sejumlah proyek melewati tahun anggaran yang telah ditetapkan.

## ATASI BANJIR, RADAR CIREBON GRUP DUKUNG PEMBUATAN BIOPORI



CIREBON- Dibutuhkan peran serta semua pihak untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Cirebon. Pembuatan lubang biopori pun digalakan untuk mengurangi genangan air di permukaan.

CEO Radar Cirebon Grup, Yanto S Utomo, menjelaskan jika permasalahan banjir yang menerjang sejumlah titik di Kota Cirebon merupakan permasalahan yang harus dipecahkan secara bersama-sama. “Karena itu kami pun sangat mendukung setiap bentuk gerakan yang bisa mencegah terjadinya banjir,” ungkap Yanto. Salah satunya dengan membuat lubang biopori.



Menurut Yanto, saat ini sudah ada sebanyak 70 titik lubang biopori yang ada di kantor Radar Cirebon Grup. Pembuatan lubang biopori ini merupakan peran serta dari Radar Cirebon Grup untuk mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di Kota Cirebon. “Sekaligus mendukung program Radar yang memanfaatkan sampah-sampah sebagai tabungannya para karyawan,” ungkap Yanto.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Drs. H. RM Abdullah Syukur, M.Si, menjelaskan jika di Kota Cirebon dibutuhkan sekitar 201.218 lubang biopori. “Keberadaan ratusan lubang-lubang biopori tersebut dapat menampung air hujan yang turun di Kota Cirebon,” ungkap Syukur. Karena itu, pihaknya pun menargetkan agar tahun ini pembuatan lubang biopori tersebut bisa tercapai.



Lubang resapan biopori tersebut merupakan sistem drainase ramah lingkungan. Sehingga air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tidak terbuang sia-sia ke sungai maupun laut. Namun bisa meresap mengalirkan air permukaan ke dalam tanah. “Sehingga bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas air tanah,” ungkap Syukur. Krisis air tanah pun bisa teratasi. Serta yang terpenting lainnya, mengurangi genangan air atau banjir.

Sedangkan Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H Dedi Taufik, M.Si, mengharapkan peran serta dari semua pihak untuk ikut membuat lubang biopori ini di lingkungan rumah masing-masing. “ini sebagai bentuk ajakan kecil untuk peduli terhadap lingkungan,” ungkap Dedi. Gerakan ini pun akan ditularkan secara masif ke seluruh masyarakat di Kota Cirebon.

Selanjutnya, gerakan pembuatan biopori ini akan digalakan di setiap sekolah yang ada di Kota Cirebon. Sehingga sejak dini, anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa bisa diajarkan dan mengerti bagaimana menjaga alam untuk semua umat manusia.

## PEMDA KOTA CIREBON SALURKAN DANA STIMULAN RP2,7 MILIAR UNTUK ATLET



CIREBON—Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon menyalurkan dana stimulus sebesar Rp2,7 miliar untuk cabang olahraga (Cabor) yang berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cirebon, Selasa (20/03).



Besaran dana stimulus Rp2,7 miliar dikeluarkan Pemda Kota Cirebon sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), adapun besaran dana yang diterima tiap cabang olahraga (Cabor) yang terkecil mulai dari Rp10 juta dan yang paling besar Rp30 juta. Adapun realisasinya hingga saat ini baru mencapai Rp600 juta untuk dana operasional.



Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si mengatakan dana stimulus yang diberikan memang jumlahnya tidak besar akan tetapi diharapkan dapat

merangsang para atlet untuk lebih berprestasi khususnya pada Porda yang digelar Oktober 2018 mendatang.

“Posisi Kota Cirebon saat ini ada di urutan 10 besar, pada Porda 2018 nanti diharapkan bisa jadi 5 besar,” katanya.



Dedi mengungkapkan para stakeholder cabang olahraga yang menerima dana stimulan ini akan dibimbing oleh Inspektorat dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya, sehingga mereka mampu berprestasi, sukses secara ekonomi, penyelenggaraan dan administrasi.

“Jika target masuk 5 besar tercapai atau bahkan lebih baik lagi, anggaran stimulan tahun depan kemungkinan besar akan ditambah,” tuturnya.

Dedi mengimbau kepada stakeholder Cabor agar dapat mengarahkan para atlet untuk dapat menjaga stamina pada saat pelaksanaan event Porda 2018 agar saat bertanding para atlet mendapatkan hasil yang terbaik.

“Tadi Ketua KONI Kota Cirebon sudah bilang siap mencapai target masuk 5 besar, tentu hal itu bukan tanpa perhitungan matang,” ujarnya.



Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Cirebon, Hj. Wati Musilawati memaparkan untuk Porda 2018 nanti 40 Cabor dari Kota Cirebon sudah melaksanakan Babak Kualifikasi (BK) dengan hasil sebanyak 33 Cabor akan ikut bertanding di Porda 2018 di Bogor.

“Terkait soal dana stimulan kami harapkan tahun depan ada penambahan, seiring bertambahnya Cabor dan juga prestasinya,” paparnya.

## INVESTOR PASAR BALONG AKAN DIPANGGIL KEMBALI



CIREBON- Tertundanya renovasi Pasar Balong akan segera diidentifikasi kembali. Pemanggilan investor juga akan dilakukan untuk mencari tahu persoalan yang terjadi.

Hal tersebut diungkapkan Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, saat disinggung mengenai renovasi Pasar Balong yang tak kunjung selesai hingga kini. “Terlebih dulu Perumda Pasar akan dipanggil,” ungkap Dedi. Pemanggilan tersebut untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi terkait renovasi Pasar Balong yang hingga kini belum terlaksana.



Selain itu, pemanggilan terhadap investor juga akan dilakukan. Pihaknya, lanjut Dedi, ingin mengetahui apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh investor tersebut sehingga berdampak pada masih tertundanya renovasi Pasar Balong hingga kini. “Kita akan lihat perjanjian kontraknya seperti apa,” tegas Dedi.

Sementara itu Direktur Utama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Akhyadi, SE, menjelaskan jika renovasi Pasar Balong dilakukan oleh PT Metro Panen Raya selaku investor. “Mereka mengaku masih melakukan sejumlah proses perizinan terlebih dahulu sebelum melakukan renovasi Pasar Balong,” ungkap Akhyadi. Namun, lanjut Akhyadi, mereka telah melayangkan surat teguran kedua kalinya kepada PT Metro Panen Raya terkait kesanggupan untuk mengelola Pasar Balong.

Apabila hingga akhir Maret ini tak kunjung memberikan jawaban, maka tindakan tegas akan segera dilakukan Perumda PD Pasar Berintan Kota Cirebon. “Kami tak segan-segan memutuskan kontrak tersebut dan mengganti dengan investor lainnya,” ungkap Akhyadi.

Pasar Balong nantinya akan dijadikan sebagai pasar sandang dengan sejumlah fasilitas penunjang lainnya.

## OPEN BIDDING UNTUK PEJABAT ESELON DUA BISA DIGELAR



CIREBON- Satu posisi eselon dua April mendatang mengalami kekosongan. Open bidding bisa dilakukan atas izin dari Pemerintah Provinsi Jabar dan Kementerian Dalam Negeri.

Pjs Wali Kota Cirebon, Dr H Dedi Taufik, M.Si, menjelaskan jika dirinya sudah menerima adanya laporan kekosongan eselon dua April mendatang di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. “kekosongan itu harus diisi,” tegas Dedi. Karena itu Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan segera melakukan usulan ke Pemerintah Provinsi Jabar dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. “Kita lakukan open bidding nanti,” ungkap Dedi.

Pada prinsipnya, lanjut Dedi, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelayan bagi masyarakat. Jika dibiarkan kosong, maka bisa mengganggu pelayanan tersebut.



Sementara itu Kepala BKPPD Kota Cirebon, H. Anwar Sanusi S.Pd., M.Si, menjelaskan jika pada 1 April mendatang, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Drs. Dana Kartiman akan pensiun. “Kami sudah memberikan nota dinas kepada wali kota bahwa ada kekosongan jabatan untuk eselon dua April mendatang,” ungkap Anwar.

Namun tidak hanya eselon dua, kekosongan juga terjadi di eselon 3 sebanyak 4 orang, eselon 3b sebanyak 6 orang, eselon 4A sebanyak 29 orang dan eselon 4B sebanyak 16 orang. Untuk kekosongan eselon 4A sebanyak 13 orang nanti bisa diambil dari UPTD Pendidikan yang dilikuidasi.

Kekosongan jabatan tersebut, lanjut Anwar, bisa segera diisi oleh Pjs Wali Kota Cirebon saat ini. “Pjs tidak ada bedanya dengan wali kota,” ungkap Anwar. Namun untuk melakukannya tetap harus mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri.

## GERAKAN PEMBUATAN LUBANG BIOPORI DIGALAKAN SECARA MASIF DI KOTA CIREBON



CIREBON-Untuk mengurangi permasalahan banjir, pembuatan lubang biopori dilakukan secara masif di setiap sekolah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Drs. H Jaja Sulaeman, M.Pd, menyambut baik adanya gerakan pembuatan lubang biopori yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. “Kami sangat apresiasi dan akan kami dukung,” tegas Jaja. Bahkan pembuatan lubang biopori ini akan dilakukan secara masif di semua tingkatan sekolah, mulai dari SD dan SMP yang ada di Kota Cirebon.

Pekan depan, lanjut Jaja, akan dimulai pembuatan lubang biopori di SMP Negeri 11 Kota Cirebon. “Seluruh kepala SMP akan diundang untuk mengetahui apa dan bagaimana cara pembuatan lubang biopori tersebut,” ungkap Jaja. Program ini menurut Jaja juga sangat baik untuk pendidikan karakter anak-anak didik di Kota Cirebon. “Agar mereka lebih peduli terhadap lingkungan sejak masih di bangku sekolah,” ungkap Jaja. Diakui Jaja, sebelumnya pembuatan lubang biopori ini memang sudah ada, tapi tidak secara masif seperti saat ini. Karena itu ditargetkan tahun ini seluruh sekolah baik SD maupun SMP yang ada di Kota Cirebon memiliki lubang-lubang biopori.



Hal yang sama juga sudah dilakukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon. Pagi ini, Rabu, 21 Maret 2018, sudah dibuat sedikitnya 12 lubang biopori di

halaman kantor tersebut. “Ini sebagai bentuk dukungan kita terhadap program tersebut,” ungkap Kepala DKIS Kota Cirebon, Iing Daiman, S.Ip., M.Si. Dengan pembuatan lubang biopori yang dilakukan secara masif, maka diharapkan bisa mengurangi genangan air yang ada di permukaan.

Sementara itu Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, kembali menegaskan jika pembuatan lubang biopori harus dilakukan secara masif di Kota Cirebon. “Ini harus kita lakukan sebagai sebuah solusi, sambil menunggu pembenahan aliran sungai dan pembenahan sungai di daerah hulu,” ungkap Dedi. Karena itu, setiap sekolah maupun kantor OPD terus digalakan untuk lebih peduli terhadap lingkungan salah satunya dengan membuat lubang-lubang biopori di lingkungan mereka.

Manfaat lubang biopori ini, lanjut Dedi, sangat banyak. “Diantaranya bisa mengurangi genangan air,” ungkap Dedi. Air yang ada di permukaan bisa dengan cepat masuk ke dalam tanah. Namun tidak hanya itu, keberadaan lubang-lubang biopori juga akan mempertahankan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas air tanah di Kota Cirebon.

## DPRD KOTA CIREBON TERIMA LKPJ WALIKOTA PERIODE 2013-2018



CIREBON- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Cirebon Akhir tahun 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan periode 2013-2018 pada Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Gotrasawala DPRD, Rabu (21/3).

Dalam rapat tersebut DPRD memberikan persetujuan, walaupun ada beberapa catatan di setiap bidang kegiatan. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Lili Eliyah, SH. MM dihadiri 24 anggota DPRD Kota Cirebon. Hadir pada kesempatan tersebut PJS Wali Kota Cirebon, DR. H. Dedi Taufik, MSi. “Kami melaporkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon selama tahun Anggaran 2017 dan Masa Akhir Jabatan 2013-2018. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alhamdulillah hasilnya diterima walaupun ada beberapa catatan,” ungkap Dedi.

Dedi menambahkan LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon secara keseluruhan. Seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD akan dijadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Cirebon mendatang.



“Seiring dengan berakhirnya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah .red) Kota Cirebon tahun 2013-2018, maka seluruh rekomendasi akan dijadikan rujukan dalam penyusunan RPJMD 2018-2023. Sedangkan untuk jangka pendek akan kami integrasikan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah red) tahun perencanaan 2019 mendatang,” kata Dedi.

Dalam pembahasan laporan LKPJ yang disampaikan oleh Ketua Pansus Pembahasan LKPJ, Dani Mardani SH, MH, terdapat rekomendasi yang harus diperhatikan dan dibenahi oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Beberapa rekomendasi diantaranya kebijakan pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat, penyelenggaraan tugas pembantuan urusan bersama, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.



“Kami harapkan laporan rekomendasi yang disampaikan dapat dilaksanakan pada pembangunan Pemerintah Dearah Kota Cirebon periode selanjutnya. Harapan kami ketika rekomendasi dilaksanakan akan terwujud dan membawa kemajuan. Karena jika maju kotanya, rakyatnya pun akan sejahtera,” tandasnya.

## NETTY : “KELUARGA BENTENG TERAKHIR BAGI ANAK DI ERA GLOBALISASI”



CIREBON- Keluarga merupakan benteng pertahanan bagi anak menghadapi era globalisasi saat ini. Keluarga sehat dan sejahtera dibutuhkan agar tumbuh kembang anak tidak terganggu.



Hal tersebut diungkapkan Ketua TP PKK Jawa Barat, DR. Hj. Netty Ahmad Heryawan ketika memberikan sambutan dalam kegiatan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Ruang Adipura Balaikota Cirebon, Rabu (21/3). Netty mengatakan peran keluarga sangat penting dalam menjaga moral bangsa. “Keluarga merupakan benteng terakhir untuk membendung persoalan moral dan kesehatan. Di era globalisasi dan berbagai tantangan tidak mungkin sebuah bangsa kuat tanpa hadirnya peran keluarga yang sehat dan sejahtera,” ungkap Netty.



Netty menambahkan betul jika indikator keluarga yang sehat dan sejahtera bukan saja materi tapi aspek non materi, seperti agama serta nilai spiritualitas. Berbagai indikator tersebut harus menjadi sendi dalam membangun keluarga. “Sehingga apapun tantangannya. Anak kita bisa melalui hal-hal yang tidak mungkin dihindari di masyarakat, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, HIV AIDS, dan kegiatan negatif lainnya,” ujar Netty.

Kehadiran Netty dan tim verifikasi untuk melakukan rechecking atau penilaian P2WKSS. Tim verifikasi juga melakukan peninjauan ke RW.10 Kelurahan Kesenden Kota Cirebon. Wilayah Kesenden akan mewakili Kota Cirebon mengikuti lomba P2WKSS.



Sementara PJS Wali Kota Cirebon, DR. H. Dedi Taufik, MSi mengatakan kehadiran tim verifikasi yang dipimpin DRS Agus Kurniawan MM diharapkan dapat memberikan motivasi peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Peran perempuan sangatlah strategis terutama dalam membentuk jiwa keluarga menjadi lebih baik.

“Program P2WKSS merupakan kegiatan yang membentuk keluarga lebih sejahtera dan hidup lebih berkualitas,” kata Dedi.



Peran perempuan, lanjut Dedi bukan hanya ketika menghadapi kegiatan P2WKSS tapi lebih jauh dalam kehidupan sehari-hari. Tentu tantangannya lebih berat karena harus menghadapi berbagai persoalan sehingga menjaga keluarga dan menumbuhkan peran serta dalam pembangunan. Pihaknya percaya dengan kemampuan perempuan di Kota Cirebon yang memiliki kualitas baik.

## SATU DATA, DKIS KOTA CIREBON BUATKAN

### PORTAL CIREBON SATIN BULAN INI



CIREBON- Maret ini, portal Cirebon Satu Informasi (Satin) segera dibuatkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika (DKIS) Kota Cirebon. Semua stakeholders diharapkan mengisi portal tersebut sehingga Cirebon satu data dan satu informasi bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Kepala DKIS Kota Cirebon, Iing Daiman, S.Ip., M.Si, menjelaskan jika Maret ini DKIS Kota Cirebon sudah akan membuat portal Cirebon Satin. “Awal April kami akan melatih operatornya dan minggu kedua hingga minggu ke empat portal tersebut sudah terisi,” ungkap Iing. Sekalipun di awal beroperasinya portal Cirebon Satin belum memiliki kelengkapan data, namun yang terpenting portal tersebut sudah terisi sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses data yang mereka butuhkan.



Pengisian portal Cirebon Satin, lanjut Iing, dilakukan oleh stakeholder terkait. “kita menyebutnya produsen data,” ungkap Iing. Produsen data itu yang nantinya juga bertanggung jawab terhadap isi dari data yang dimasukkan ke dalam portal Cirebon Satin. “DKIS menyediakan rumahnya,” ungkap Iing. Kota Cirebon, lanjut Iing sudah memiliki SK Wali Kota No 134.05/Kep.408-DKIS/2017 tentang Forum Satu Data. Nantinya semua stakeholders, baik pemerintah daerah, BI, OJK, serta lembaga BUMN maupun BUMD akan memberikan data mereka. “Semua data terintegrasi semua dalam Cirebon Satin,” ungkap Iing.

Sementara itu Pjs Wali Kota Cirebon, Dr H Dedi Taufik, M.Si, mengungkapkan Cirebon satu data ini penting untuk keterbukaan informasi kepada publik.”Juga untuk mempermudah akses pencarian data bagi masyarakat,” ungkap Dedi. Sehingga bisa memudahkan pengambilan kebijakan di masing-masing stakeholders.



Tidak hanya itu, 28 aplikasi yang sudah dibuatkan oleh DKIS dalam rangka smart city juga harus disosialisasikan. “Harus dimanfaatkan untuk kepentingan kita semua,” ungkap Dedi. Selanjutnya dalam satu bulan ke depan program tersebut akan dievaluasi, untuk mengetahui data mana saja yang sudah dimasukkan dalam Cirebon Satin.

### 3.503 WARGA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) KOTA CIREBON DAPAT BANTUAN GAS ALAM



CIREBON- Sebanyak 3.503 Warga Masyarakat Berpendhasilan Rendah (MBR) Kota Cirebon tahun 2018 ini mendapat bantuan gas alam dari Pemerintah melalui Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Penyambungan gas alam oleh Ditjen Migas merupakan program Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2018 untuk 16 kota dan kabupaten yang salah satunya Kota Cirebon.



Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik M. Si, mengatakan bantuan pemasangan gas alam dialokasikan untuk warga berpendhasilan rendah dan jumlah penerimanya tahun 2018 ini sebanyak 3.503 orang.

"Tahun 2014 Kota Cirebon juga mendapat bantuan serupa untuk lebih dari 4.000 orang," katanya usai penandatanganan MoU Ditjen Migas dan 16 pimpinan daerah, Jumat (23/03).

Dedi menuturkan total bantuan gas alam mulai tahun 2014 dan 2018 sebanyak 7.400 orang dan dialokasikan di Kecamatan Harjamukti. "Penerimaan bantuan gas alam tersebar di Kelurahan Kecapi, Kalijaga dan Harjamukti," ujarnya.



Dedi menambahkan target Pemda Kota Cirebon untuk bantuan pemasangan gas alam sebanyak 10.000 orang (rumah tangga).

Sementara itu, PLT Dirjen Migas Kementerian ESDM, Ego Sharial menuturkan program pemasangan gas alam telah dilakukan sejak 2009, dan hingga tahun 2017 telah terpasang sebanyak 228.515 jaringan untuk rumah tangga. "Program ini kami menggandeng Pertamina dan PGN," ujarnya.



Ego menambahkan program Kementerian ESDM mengikuti arahan dari Presiden Jokowi yang menginginkan program kementerian sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan yang bisa dinikmati rakyat secara langsung.

"Pemasangan gas alam untuk rumah tangga ini merupakan arahan dari Presiden yang menaruh perhatian khusus untuk program ini," tambahnya.

## TURNAMEN WALI KOTA CIREBON OPEN 2018 SUKSES DIGELAR



CIREBON- Turnamen bulutangkis bergengsi, Wali Kota Open 2018 sukses digelar di Kota Cirebon, puluhan pebulutangkis berhasil meraih juara dengan total hadiah Rp185,2 juta.

Turnamen Wali Kota Cirebon Open 2018 merupakan turnamen skala nasional yang dibuka pada 19 Maret 2018 dan diikuti 976 pebulutangkis yang berasal dari 125 klub di Indonesia kecuali Provinsi Papua.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Asep Dedi M. Si mengatakan turnamen Wali Kota Cirebon Open 2018 terdiri dari 1.014 pertandingan dengan sistem really point. Pria yang juga menjabat Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Cirebon merasa bersyukur turnamen yang ditutup Minggu, 25 Maret 2018 ini berjalan lancar dan sukses.



"Para pemenang turnamen ini kami harapkan dapat meraih gelar juara di turnamen yang lebih tinggi," katanya kemarin.

Asep mengungkapkan keberhasilan penyelenggaraan turnamen Wali Kota Cirebon Open 2018 menambah keyakinan bahwa Kota Cirebon layak jadi tuan rumah turnamen skala internasional.

"Suksesnya turnamen ini tentu akan menambah kepercayaan dari pusat (PBSI)," ujarnya.

Asep menambahkan sebanyak 30 pebulutangkis Kota Cirebon juga turut serta dalam turnamen Wali Kota Cirebon Open 2018 dan diharapkan bisa mengikuti turnamen yang lebih bergengsi.

"Pemda Kota Cirebon dan PBSI Kota Cirebon terus mendorong agar pebulutangkis lokal kian berprestasi," tambahnya.

## PEMDA KOTA CIREBON GENCARKAN PEMBUATAN BIOPORI DI SEKOLAH



CIREBON—Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon tengah mengencarkan pembuatan biopori di lingkungan masyarakat, sebagai upaya memaksimalkan penyerapan air oleh tanah untuk pencegahan musibah banjir.

Pembuatan lubang serapan biopori mulai gencar dilakukan di lingkungan kantor instansi pemerintahan, khususnya di lingkungan sekolah yang ada di Kota Cirebon mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Target pembuatan biopori di sekolah tahun ini sebanyak 2.018 lubang di seluruh sekolah di Kota Cirebon.



Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik M. Si, mengatakan pembuatan lubang serapan biopori merupakan bagian dari program PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang sedang gencar disosialisasikan kepada masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Cirebon.

Dia menuturkan target utama sosialisasi PHBS adalah masyarakat yang juga termasuk kalangan pelajar bisa memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mampu melakukan upaya kecil mencegah banjir dengan membuat biopori di lingkungan tempat tinggalnya.



“Bersamaan dengan program Pemda Kota Cirebon memperbaiki sedimentasi, dan senderan sungai, masyarakat kami ajak turut membuat biopori,” katanya usai memimpin upacara bendera di SMPN 11 Kota Cirebon, Senin (26/03).

Dedi mengungkapkan gerakan masif pembuatan biopori akan gencar dilakukan di lingkungan sekolah, harapannya agar para siswa menjadi duta PHBS dan dapat membuat biopori di lingkungan rumahnya. “Harapannya seluruh elemen masyarakat di Kota Cirebon juga ikut membuat biopori minimal di sekitar tempat tinggalnya,” ujarnya.



Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan kota Cirebon, H Jaja Sulaeman MPd merasa optimis jika target pembuatan 2.018 biopori di sekolah tahun ini bisa tercapai, karena ada sekolah-sekolah yang mampu membuat biopori lebih banyak dari yang ditargetkan seperti di SMPN 11 Kota Cirebon yang mampu membuat 35 biopori dari target 10 biopori.

“Pembuatan biopori di sekolah merupakan tahap awal, setelah target tercapai maka akan dilakukan evaluasi,” tuturnya.

## DUKUNG PERCEPATAN BIDANG LAIN, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JADI PRIORITAS



CIREBON-Infrastruktur akan menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun perencanaan 2019 untuk mendukung percepatan bidang lain. Pembangunan infrastruktur sangat strategis karena memicu bidang lain yakni pariwisata, kesehatan, pendidikan, perdagangan dan lainnya.

Demikian diungkapkan PJS Wali Kota Cirebon, DR. H. Dedi Taufik, MSi saat mengikuti Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Wilayah III Cirebon 2019 di Hotel Luxton, Senin (26/3).



Dedi mengatakan infrastruktur tentunya akan selalu menjadi prioritas selain penetapan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan 10 persen.

“Pembangunan infrastruktur tentunya akan dilakukan sesuai kebutuhan dan kekuatan anggaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Kami harapkan tentunya pembangunan akan berdampak positif dan berdampak bagi kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkap Dedi.



Dedi menambahkan pihaknya juga sedang mempertimbangkan untuk membuat jalan ring road yang akan mempercepat transportasi antar wilayah terutama dengan Kabupaten Cirebon. Ring road tentunya akan mengurai kemacetan serta memperpendek jalur yang biasanya harus dilalui warga terutama yang tinggal di luar Kota Cirebon.

“Kegiatan Pra Musrenbang ini tentu akan memilah berbagai kegiatan prioritas yang harus diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan berbagai usulan tersebut sehingga diperkirakan dapat dilakukan pembangunan pada perencanaan pembangunan tahun 2019 mendatang,” kata Dedi.



Sementara itu, dalam kegiatan Pra Musrenbang tersebut juga mengemukakan terkait persiapan penggunaan Bandara Kertajati pada tahun 2018. Dedi yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat juga banyak menyampaikan perkembangan pembangunan Bandara Kertajati.

“Kemungkinan Bandara Kertajati akan melakukan tes penerbangan pada Bulan Mei mendatang. Karena ada rencana pada Bulan Juli dan Agustus 2018, Bandara Kertajati akan menjadi penerbangan haji. Jika melihat kondisi sekarang memang belum bisa tapi dengan penambahan run way sepanjang 600 meter tentu pesawat jenis besar dapat mendarat,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Ir. H. Yerry Yanuar, MM terkait persiapan pembangunan Bandara Kertajati . Yerry mengatakan ada keinginan Presiden Joko Widodo agar pemberangkatan haji pertama dari Bandara Kertajati.

“Tentu dengan penambahan run way sepanjang 600 meter dari 2.400 menjadi 3.000 meter memungkinkan pesawat besar seperti Saudi Arabia Airline dapat terbang dari Bandara Kertajati,” ungkap Jerry.



Jerry menambahkan Bandara Kertajati memungkinkan akan dipadati penumpang dari berbagai daerah terutama Jabar wilayah Timur seperti Wilayah Cirebon dan Tasikmalaya serta Jawa Tengah Wilayah Barat seperti Brebes, Tegal, Cilacap, Pekalongan hingga Semarang. Pihaknya juga mengharapkan Pra Musrenbang dapat menghasilkan program berkualitas.

## TARGET 18 MEDALI EMAS DI PORDA XIII JABAR



CIREBON- Bonus akan diberikan Pemerintah Daerah Kota Cirebon jika target 18 medali emas pada Pekan Olahraga Daerah (Porda) ke XIII tingkat Jawa Barat dicapai kontingen Kota Cirebon. Porda akan digelar di Kabupaten Bogor, Oktober mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. Asep Dedi, M.Si, saat pengukuhan tim Kontingen Kota Cirebon di Porda Jabar XIII/2018 di GOR Bima Sunyaragi, Selasa, 27 Maret 2018, mengungkapkan jika tim Porda Kota Cirebon harus melakukan persiapan yang matang dan maksimal. “Karena Kota Cirebon menargetkan masuk 10 besar Porda Jabar,” ungkap Asep.



Tidak hanya target masuk 10 besar, kontingen Kota Cirebon juga ditargetkan meraih 18 medali emas. “Jika tercapai, bonus kepada mereka juga akan diberikan,” janji Asep. Karena sejumlah target tersebut Asep berharap seluruh atlet, pelatih, manajer, dan official bisa bekerja keras untuk meraihnya. “Jangan lupa, atlet pun harus bermain sportif,” pesan Asep.

Sementara itu Ketua Tim Manajer Kontingen Kota Cirebon, H. Sukirman, SE., MM, mengungkapkan total ada 440 orang Kontingen Porda Kota Cirebon tahun ini. Masing-masing terdiri dari atlet sebanyak 318 orang, pelatih sebanyak 72 orang, manajer sebanyak 33 orang dan official sebanyak 17 orang. Selanjutnya mulai Januari hingga September 2018 ini seluruh personil yang masuk dalam kontingen Porda Kota Cirebon diberikan uang bulanan. “Jumlahnya beragam,” ungkap Sukirman.



Untuk atlet mendapatkan Rp 750 ribu/orang/bulan, sedangkan untuk pelatih,manajer dan official masing-masing mendapatkan Rp 900 ribu/orang/bulan. Hari ini diberikan secara simbolis oleh Sekda Kota Cirebon uang bulanan selama 3 bulan yaitu mulai Januari hingga Maret kepada seluruh anggota kontingen. “Sedangkan bulan selanjutnya akan diberikan tanggal 15 setiap bulannya,” ungkap Sukirman. Sukirman berharap uang bulanan tersebut bisa dijadikan semacam vitamin bagi seluruh anggota kontingen agar berupaya lebih keras lagi agar target bisa tercapai. “Kami juga mohon dukungan dan doa dari semua pihak dan masyarakat Kota Cirebon agar bisa berupaya maksimal sehingga target bisa dicapai,” ungkap Sukirman.



Sementara itu Ketua KONI Kota Cirebon, Wati Musliwati, berharap agar hasil yang dicapai kontingen Kota Cirebon dalam Porda tahun ini bisa lebih baik lagi dibandingkan tahun sebelumnya. “Kami berharap target 18 medali emas itu bisa tercapai,” ungkap Wati.

## **HINGGA AKHIR MARET, BARU 30 PROPOSAL UNTUK BAWAL YANG MASUK KE DSPPPA KOTA CIREBON**



CIREBON-Sekalipun sudah disosialisasikan sejak awal 2018, baru 30 proposal dari RW untuk pengajuan bantuan walikota (bawal) yang masuk ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon. Dinas terkait juga mengalami kendala kurangnya personil.

Kepala DSPPPA Kota Cirebon, H. Jamaludin, S. Sos, menjelaskan jika hingga akhir Maret ini baru sekitar 30 proposal untuk pengajuan bantuan walikota (bawal) yang masuk ke dinas yang dipimpinnya. Padahal jumlah RW di Kota Cirebon mencapai 247. “Dari jumlah yang sudah masuk, baru ada sekitar 15 proposal bawal yang sudah disetujui,” ungkap Jamaludin. Untuk proposal yang sudah disetujui, selanjutnya akan dikembalikan ke pihak RW dan RW sendiri yang akan mengajukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD).

Keterlibatan DSPPPA sendiri, lanjut Jamaludin, dalam pencairan bawal tersebut yaitu hanya memasukkan anggarannya ke APBD. Juga melakukan koreksi terhadap proposal yang diajukan oleh RW. “Sekaligus membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nya,” ungkap Jamaludin. Sedangkan untuk pencairannya, merupakan bagian dari RW yang bersangkutan dengan BKD.

Namun Jamaludin juga mengakui, jika pihaknya mengalami keterbatasan personil yang menangani bidang tersebut. “Sehingga prosesnya agak sedikit lama,” ungkap Jamaludin.

Sementara itu Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, Ali Muarin, menjelaskan jika pihaknya sudah siap untuk melakukan pencairan jika ada proposal bawal yang masuk. “Namun hingga akhir Maret ini memang belum ada yang masuk,” ungkap Ali. Padahal sejak jauh-jauh hari sudah dilakukan sosialisasi jika bawal sudah bisa dicairkan akhir tahun. Sehingga tidak perlu menunggu di pertengahan bahkan akhir tahun.

Selanjutnya Ali menekankan jika pihaknya tidak akan pernah mempersulit para RW yang akan melakukan pencairan bawal. “Selama persyaratannya memenuhi dan lengkap, kami siap untuk mencairkannya,” tegas Ali. Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya, proposal permohonan pencairan, pernyataan pertanggungjawaban, NPHD, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), bukti kwitansi penerimaan uang, Surat Keputusan (SK) RW, fotocopy rekening Bank Jabar, fotocopy KTP ketua RW dan bendahara.

## PERLU GAET INVESTASI UNTUK PERTUMBUHAN, PRESIDEN JOKOWI MINTA DPRD JANGAN BANYAK BIKIN PERDA



Pjs. Wali Kota Cirebon tiba di lokasi acara Jiexpo Kemayoran Jakarta, Rabu (28/3).

Dok.Istimewa/[caption]

JAKARTA- Jika pada 2017 lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,07 persen, pada 2018 ini pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,4 persen. Hal ini karena menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), sekarang ada momentumnya karena kepercayaan internasional, kepercayaan dunia usaha terhadap perekonomian kita ini semakin baik.

“Saya berikan contoh, misalnya kemudahan usaha (*ease of doing business*) yang meningkat. 2014 kita pada ranking 120, 2017 kemarin kita meloncat menjadi 72, ini loncatan yang sangat, loncatan yang sangat tinggi sekali. Tapi 72 juga angka masih jauh dari target kita,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Pemerintah mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, di Hall B3, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/3) siang.

Menurut Presiden, hal itu menunjukkan bahwa di lapangan masih ruwet. Untuk itu, Presiden menargetkan tahun depan harus sudah masuk ke 40 besar. Ia meyakini, kalau sudah masuk 40 besar agak mudah nanti. “Image, persepsi internasional, persepsi dunia usaha di dalam negeri semuanya akan baik,” kata Presiden seraya menyampaikan, *Global Competitive Index* kita tahun 2017 yang lalu berada pada posisi 36. Artinya indeks daya saing kita cukup baik.

Presiden juga menyampaikan, pada 2017 itu, United Nations Conference on Trade and Development telah menempatkan Indonesia di peringkat keempat sebagai tujuan investasi utama. Nomor yang menurutnya sudah bagus. Bahkan, lanjut Presiden, survei terbaru US News menempatkan Indonesia di posisi kedua dengan persepsi dan tren terbaik untuk investasi.

Tapi Presiden mengingatkan, hati-hati, jangan tepuk tangan dulu, karena itu persepsi, itu tren. Sebab, kalau mereka datang, kemudian lapangannya tidak sesuai dengan persepsi yang ada di benak para CEO-CEO dunia, ya lari lagi, meloncat lagi, tidak jadi untuk investasi di negara kita.

## Perlu Investasi

Kenapa kita perlu investasi? Menurut Presiden, karena kalau ada arus modal masuk ke sebuah kabupaten, arus modal masuk ke sebuah kota, artinya ada arus uang masuk ke kota itu, ada arus uang masuk ke kabupaten itu.

“Kalau ada arus uang masuk, artinya peredaran uang di kabupaten atau di kota itu akan semakin tinggi, uangnya semakin banyak, ekonominya berarti jalan di kabupaten dan kota itu,” ujar Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar momentum kepercayaan yang positif ini betul-betul harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik untuk investasi dari dalam negeri maupun dari luar. Terutama, yang kita butuhkan sekarang ini yang bisa meningkatkan pertumbuhan itu hanya ada dua, yang pertama ekspor, yang kedua investasi.

APBN itu, menurut Presiden, pengaruhnya hanya 20 persen. Artinya yang 80 persen itu adalah pekerjaannya swasta. Ia meyakini, kalau kita bisa meng-*create*, mereka senang ekspansi, senang menginvestasikan modalnya di kabupaten dan kota yang ada di seluruh tanah air, itu yang diharapkan.

Oleh sebab itu, dalam rapat kerja yang dihadiri Ketua DPRD, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia itu, Presiden Jokowi menitipkan pesan jangan bikin perda-perda yang menghambat orang ingin berusaha, jangan bikin perda-perda yang menghambat investasi, jangan bikin perda-perda yang membebani.

“Mungkin perda itu setahun satu, dua, tiga cukup lah,” tutur Presiden seraya menambahkan, dirinya juga sudah menyampaikan ke DPR agar enggak usah banyak-banyak buat undang-undang. Satu, dua, tiga, cukup tapi kualitasnya yang baik.

Rapat Kerja Pemerintah itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkom Perekonomian Darmin Nasution, Mendagri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkominfo Rudiantara, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Sumber :<http://setkab.go.id/>

## **ZAMAN SERBA SINGKAT, PRESIDEN JOKOWI MINTA BUPATI/WALIKOTA/DPRD PANGKAS SEMUA URUSAN PERIZINAN**



Pjs. Wali kota Cirebon tiba di lokasi acara Jiexpo Kemayoran Jakarta, Rabu (28/3).  
Dok.Istimewa[/caption]

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kita masih memiliki pekerjaan rumah (PR) 42.000 regulasi yang menjerat kita sendiri, yang membuat pemerintah tidak bisa bergerak cepat. Ke-42 ribu peraturan, ada mulai dari undang-undang, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan turunannya ke bawah ada Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Walikota (Perwali), dan Peraturan Bupati (Perbup).

“Hati-hati, regulasi-regulasi seperti itu dengan perubahan dunia yang sangat cepat sekarang ini justru akan menjerat kita sendiri, tidak fleksibel dalam membuat kebijakan, dalam memutuskan sebuah kebijakan,” kata Presiden Jokowi pada Rapat Kerja Pemerintah mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, di Hall B3, JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/3) siang.

Dalam rapat kerja yang dihadiri oleh Bupati/Walikota dan para Ketua DPRD se Indonesia itu, Presiden menegaskan, daerah harus berani melakukan reformasi besar-besaran untuk mempermudah iklim usaha, iklim investasi.

Ia menunjuk contoh Menteri Keuangan yang membongkar besar-besaran urusan impor dan ekspor yang menyangkut kepabeanan di Bea Cukai, misalnya Izin Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor, dari tiga puluh hari biasanya, mengurus izin kemudahan impor tiga puluh hari hanya menjadi satu jam mulai kemarin. Izin Tempat Penimbunan Barang dari yang sebelumnya sepuluh hari menjadi satu jam.

“Ya yang gini-gini yang dibutuhkan, jangan hanya pemerintahan pusat saja, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, lakukan ini,” tutur Presiden Jokowi.



Suasana Kegiatan Acara Jiexpo Kemayoran Jakarta, Rabu (28/3). Dok. Istimewa[/caption]

Presiden mengingatkan, dunia sudah sangat berubah. Kalau kita masih rutinitas, masih monoton, tidak ada inovasi, maka akan ditinggal. Ia menilai sebagai hal yang kuno jika untuk mengurus izin harus membawa kertas berlembar-lembar.

“Kita ini hidup sekarang ini di era yang sangat modern, semuanya sekarang ini mintanya serba singkat, kita harus sadar itu, mintanya semuanya serba cepat, kita harus ngerti itu, mintanya semuanya serba *online*,” tutur Presiden seraya menambahkan, itu tugas para pemimpin di daerah harus melakukan serba cepat, serba singkat, serba *online*.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar semua syarat-syarat dipangkas, semua yang berkaitan urusan izin-izin semuanya dipangkas. Tidak boleh lagi yang bertele-tele.

“Itu sudah harus hilang. Percaya kalau kabupaten dan kota Bapak-Ibu semuanya, ingin maju ya inilah caranya kalau ingin sesuai dengan zaman sekarang. Kalau ingin dikatain kuno, ya silakan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden menekankan kembali permintaannya agar Bupati/Wali Kota/Ketua DPRD jangan memproduksi perda yang terlalu banyak, yang menghambat, yang membebani dunia usaha, yang membebani rakyat.

“Saya juga ngerti kenapa sih dibuat perda yang banyak itu. Orientasinya kemana saya juga ngerti semuanya lah, sudah ngerti. Ini yang Ketua DPRD mana? Yang Pak Ketua DPRD? Oh campur-campur, oh ini tersebar. Ngerti, enggak usah saya beri tahu. Tapi jangan, sekali lagi, sudahlah sekarang ini kita harus masuk ke era yang modern, era yang serba singkat, serba cepat, serta *online*,” tegas Presiden Jokowi.



Sambutan Presiden RI dalam acara Jiexpo Kemayoran Jakarta, rabu (28/3).  
Dok.Istimewa[/caption]

Rapat Kerja Pemerintah itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkom Perekonomian Darmin Nasution, Mendagri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkominfo Rudiantara, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Sumber :<http://setkab.go.id/>

## **PRESIDEN JOKOWI: KALAU ENGGAK MAU MENGUBAH, KITA BISA DITINGGAL LAOS, KAMBOJA**



Sambutan Presiden RI, Joko Widodo dalam acara Jiexpo Kemayoran Jakarta, rabu (28/3).  
Dok.Istimewa[/caption]

JAKARTA - Pada kesempatan memberikan arahan pada Rapat Kerja Pemerintah mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, di Hall B3, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/3) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kabupaten/kota yang belum memiliki satuan tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution segera dibentuk.

“Karena kita ingin benar-benar jangan sampai kalah. Kita ini negara besar, dengan sumber daya alam yang besar, SDM (Sumber Daya Manusia) yang besar masak ekspor kita kalah dengan Malaysia, kalah dengan Filipina, kalah dengan Vietnam,” tutur Presiden Jokowi.

Kalau (hal ini) diterus-teruskan, kita enggak mau mengubah seperti yang telah sampaikan, menurut Presiden, kita bisa ditinggal lagi sama Laos, Kamboja.

“Ekspornya kalah kita. Investasi kita sudah kalah dengan tadi Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, kalah kita. Investasi kalah, ekspornya kalah,” terang Presiden.



Suasana Kegiatan Acara Jiexpo Kemayoran Jakarta, Rabu (28/3). Dok. Istimewa[/caption]

Padahal, lanjut Presiden, kemampuan, sumber daya alam kita gede banget, sumber daya manusia kita juga gede banget.

Diakuinya Gross Domestic Product (GDP), PDB kita sudah lebih dari 1 triliun dollar AS, namun Presiden Jokowi mengingatkan, kalau ekspor ini bisa kita genjot, investasi bisa kita genjot, kita betul-betul bisa mengubah.

“Kunci itu ada di Bapak-Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, kuncinya ada di situ, kuncinya ada di sini, di ruangan ini, ini kunci. Mau atau tidak mau, niat atau tidak niat, hanya itu saja,” pungkas Presiden Jokowi.

Rapat Kerja Pemerintah itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkom Perekonomian Darmin Nasution, Mendagri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkominfo Rudiantara, Menkumham Yasonna H. Laoly, Kepala BKPM Thomas Lembong, para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se Indonesia.

Sumber :<http://setkab.go.id/>

## PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TELAH MENYERAHKAN LKPD KEPADA BPK RI



CIREBON- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahkan Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Barat.



LKPD diserahkan langsung oleh Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Kamis, 29 Maret 2018. “Hari ini LKPD tersebut sudah kami serahkan,” ungkap Dedi. LKPD tersebut diantaranya berisi laporan keuangan unaudited, laporan revisi inspektorat, surat pernyataan mutlak dari kepala daerah, surat representasi manajemen, serta laporan keuangan BUMD yang unaudited.

Setelah penyerahan tersebut selanjutnya akan dilakukan audit di lapangan sesuai dengan standar yang ada. Komunikasi audit juga akan dilakukan dengan pihak BPK, yang berarti setiap pengguna anggaran nantinya diminta untuk mendampingi saat dilakukan pemeriksaan lapangan oleh BPK RI. Nanti kesimpulan akhirnya yaitu berupa opini.



Tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah meraih opini WTP dari BPK RI.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, H. Sukirman, SE., MM, mengaku dengan kerja sama semua pihak, seluruh satuan kerja perangkat daerah di Kota Cirebon, maka dirinya meyakini bahwa proses pemeriksaan selama kurang lebih dua bulan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga saat ada pemeriksaan di lapangan nantinya, pihaknya pun tetap yakin tidak akan terjadi kendala yang berarti. “kami semua bersinergi dan berkomitmen jika seluruh belanja yang sudah direalisasikan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Sukirman. Sehingga saat ada pemeriksaan di lapangan nantinya, pihaknya pun tetap yakin tidak akan terjadi kendala yang berarti.

## RIBUAN ORANG IKUTI FESTIVAL SENAM



CIREBON- Ribuan orang mengikuti Festival Senam yang digagas oleh Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi) Kota Cirebon. Sejumlah senam dilombakan pada festival tersebut.

Sedikitnya 5 ribu peserta mengikuti Festival Senam yang dilakukan Formi Kota Cirebon di kawasan Bima. Tidak hanya berasal dari Kota Cirebon, peserta juga banyak yang berasal dari daerah tetangga, seperti dari Kabupaten Cirebon. Umur peserta pun beragam, mulai dari 8 tahun hingga 94 tahun.



Adapun senam yang dilombakan dalam Festival Senam tersebut yaitu senam jantung sehat, senam diabet, senam tera, senam sehat Indonesia, senam aerobik, serta senam ria anak Indonesia. Hadiah pun disiapkan kepada peserta, masing-masing 20 sepeda dari Formi Kota Cirebon ditambah 5 sepeda dari Pjs Wali Kota Cirebon, serta sejumlah piala.

Turut hadir dalam festival tersebut, perwakilan Forkopimda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendidikan dan ketua Koni Kota Cirebon.



"Olahraga rekreasi ini perlu, untuk pemulihan dalam tubuh kita, " ungkap Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, usai membuka festival tersebut. Tubuh kita, lanjut Dedi butuh enjoy sehingga tingkat kebahagiaan pun naik.

Terlebih, festival tersebut dilakukan di kawasan Bima yang merupakan salah satu ruang terbuka hijau di Kota Cirebon. Salah satu kawasan yang menyerap banyak oksigen di Kota Cirebon. Selanjutnya melalui festival tersebut Dedi juga berharap bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). "jangan lupa, jaga kebersihan," ungkap Dedi.



Sementara itu Ketua Formi Kota Cirebon, Dr. H.M. Edial Sanif, Sp,JP, menyambut baik peran serta pemerintah daerah Kota Cirebon dalam kegiatan ini. "Ke depannya target kita anak anak SMP dan SMA bekerja sama dengan Disdik Kota Cirebon," ungkap Edial. Sehingga anak-anak nantinya akan mengerti dan mengetahui pentingnya olahraga sejak dini.

Formi, lanjut Edial, merupakan olahraga non prestasi yang bisa dilakukan oleh semua golongan masyarakat. "olahraga ini murah, bisa dilakukan semua golongan dan tidak perlu berat-berat," ungkap Edial. Edial pun bersyukur karena pelaksanaan festival ini setiap tahunnya juga selalu mendapat animo yang besar dari masyarakat.



Selain itu dari penyelenggaraan di 3 titik di Kota Cirebon, masing-masing di car free day Jalan Siliwangi, kawasan Grage dan kawasan Bima, sedikitnya ada 7 ribu orang di masing masing titik yang mengikuti berbagai kegiatan. Mulai dari senam rekreasi, olahraga tradisonal serta sejumlah kegiatan rekreasi lainnya.

## **Tahun Ini Perumda Pasar Berintan Fokus Di 3 Pasar Tradisioal**



CIREBON-Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon tahun ini akan fokus pada pengembangan dan permasalahan di 3 pasar tradisional yang ada di Kota Cirebon. Namun tetap tidak mengabaikan 7 pasar tradisional lainnya.

“Masing-masing yaitu Pasar Pagi, Pasar Balong dan Pasar Kanoman,” ungkap Direktur Utama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Akhyadi, SE, Kamis, 15 Maret 2018. Diakui Akhyadi, ketiga pasar tersebut saat ini sering kali di bicarakan dan muncul dalam berbagai pemberitaan di sejumlah media. Untuk Pasar Kanoman misalnya, saat ini sudah disepakati untuk dilakukan renovasi setelah pilkada 2018 selesai. Seluruh persyaratan diantaranya kesepakatan antara Ikatan Pedagang Pasar Kanoman dengan Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon telah terpenuhi. “Insya Allah, renovasi segera dilakukan menunggu selesainya pilkada 2018,” ungkap Akhyadi.

Sedangkan Pasar Balong, diakui Akhyadi hingga kini masih menunggu kepastian dari PT Metro Panen Raya selaku investor. “Kami sudah melayangkan surat teguran yang kedua pada PT Metro Panen Raya terkait kesanggupan mereka untuk mengelola Pasar Balong,” ungkap Akhyadi. Mereka memberi batas waktu hingga akhir Maret kepada perusahaan tersebut. Jika hingga akhir Maret tak kunjung ada jawaban, maka Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon akan resmi memutuskan kontrak dengan PT Metro Panen Raya. “Akan diganti dengan investor lain,” tegas Akhyadi.

Untuk Pasar Pagi, Akhyadi mengungkapkan kontrak dengan sejumlah pedagang akan habis akhir Maret ini. “Akan ada perpajakan kontrak hingga 2028 mendatang,” ungkap Akhyadi. Hingga kini proses negosiasi dengan pedagang menurut Akhyadi masih dilakukan dan berharap secepatnya bisa dicapai kata sepakat. Hasil kontrak tersebut menurut Akhyadi tidak hanya akan masuk sebagai pendapatan Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon saja, namun juga akan dialokasikan untuk melakukan pemeliharaan. Seperti pengecetan bangunan dan pembenahan lahan parkir.

Selanjutnya Akhyadi menambahkan jika Kota Cirebon saat ini memiliki 10 pasar tradisional. Masing-masing Pasar Pagi, Pasar Kanoman, Pasar Drajat, Pasar Jagasatru, Pasar Kramat, Pasar Harjamukti, Pasar Gunung Sari, Pasar Perumnas, Pasar Pronggol dan Pasar Balong. Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon juga akan terus berupaya agar seluruh pasar di Kota

Cirebon menjadi tempat belanja yang nyaman. Sehingga pasar tradisional dapat kembali menjadi lokasi tujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat di Kota Cirebon.

## **Dinas Kesehatan Kota Cirebon Waspada Penyakit Pasca Banjir**



CIREBON – Pasca banjir, sejumlah penyakit pun mengancam. Dinas Kesehatan siagakan posko siaga banjir di setiap puskesmas yang wilayahnya dilanda banjir.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, dr. Lucy Agung Susilawati, MARS, mengungkapkan jika di setiap puskesmas sudah memiliki posko kesehatan yang buka 24 jam. “Posko tersebut dilengkapi dengan ambulance, obat-obatan termasuk dokter, perawat, bidan, surveilans serta seorang sopir terlatih,” ungkap Lucy. Mereka akan selalu siaga dan langsung bertugas begitu terjadi bencana banjir di Kota Cirebon.

Seperti diketahui, banjir besar menerjang beberapa kali di sejumlah titik di wilayah Kota Cirebon. Pasca banjir, sejumlah penyakit pun harus diwaspadai. “Mulai dari penyakit kulit, ispa, diare dan lainnya,” ungkap Lucy. Tindakan paling sederhana yang bisa dilakukan warga untuk mencegah penyakit yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. “Cucilah tangan sesering mungkin dengan air mengalir,” ungkap Lucy. Tindakan sederhana tersebut bisa mencegah berbagai penyakit, terutama pasca banjir saat ini.

Selain menjaga kebersihan diri, warga juga diminta untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar mereka. “Seperti tidak membuang sampah sembarangan,” ungkap Lucy. Sehingga sampah tidak akan bertebaran yang bisa berdampak buruk pada kesehatan warga

Sedangkan untuk penanganan pasca banjir, Lucy juga meminta ada penanganan terpadu dan komprehensif dari dinas terkait lainnya. “Karena biasanya, selain obat-obatan, korban banjir juga meminta selimut dan makanan,” ungkap Lucy. Karena itu penanganan banjir tidak hanya bisa dilakukan oleh satu dinas, namun dinas terkait lainnya agar korban banjir selain tetap terjaga kesehatannya, kebutuhan dasar mereka lainnya juga tetap terpenuhi.

## **Kota Cirebon Siap Menjadi Tuan Rumah Turnamen Bulutangkis Skala Internasional**



CIREBON—Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Asep Dedi M. Si, menyatakan Kota Cirebon siap menjadi tuan rumah turnamen bulutangkis skala internasional yang diikuti atlet bulutangkis dari seluruh dunia.

Keberhasilan beberapa kali menjadi tuan rumah turnamen bulutangkis skala nasional merupakan bekal yang cukup bagi Kota Cirebon untuk menjadi tuan rumah turnamen bulutangkis skala internasional.

“Kota Cirebon sedang dipantau [kesiapannya] untuk menjadi tuan rumah turnamen skala internasional, semoga bisa tahun ini,” katanya saat memberikan sambutan Wali Kota Open 2018 di GOR Bima Kota Cirebon, Senin, 19 Maret 2018.

Adapun Turnamen Wali Kota Open 2018 diikuti 975 pebulutangkis dari 125 klub bulutangkis seluruh provinsi di Indonesia kecuali dari Provinsi Papua yang belum hadir. Adapun pertandingan digelar di GOR Bima Kota Cirebon dan GOR Katiasa Kota Cirebon dengan jumlah pertandingan sebanyak 1.014 pertandingan.

“Penyelenggaraan Turnamen Wali Kota Open 2018 ini rekor bagi Kota Cirebon dan semoga bisa melahirkan atlet bulutangkis berprestasi,” lanjut Asep.

Asep mengucapkan banyak terima kasih kepada Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) yang telah memberikan kepercayaan kepada Kota Cirebon sebagai tuan rumah turnamen ke-12 yang pernah diadakan dan turnamen ke-3 untuk turnamen swasta nasional.

“Persiapan penyelenggaraan [Wali Kota Open 2018] tentu tidaklah mudah, butuh persiapan matang dan kerja tim yang baik,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Turnamen dan Perwasitan PP PBSI, Eddiyanto Sabarudin mengungkapkan turnamen Wali Kota Open 2018 di Kota Cirebon ini terdiri dari turnamen

bulutangkis kelompok anak-anak hingga dewasa yang berasal dari 125 klub bulutangkis di seluruh Indonesia kecuali Provinsi Papua.

“Kepada para atlet kami ucapkan selamat bertanding dan selamat mengikuti kejuaraan,” ujarnya.

## **Perumda Pasar Berintan Capai Kesepakatan Dengan Pedagang Pasar Pagi**



CIREBON -Setelah melalui perundingan, akhirnya Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon bersama dengan ikatan pedagang Pasar Pagi sepakat dengan harga perpanjangan sewa. Berbagai fasilitas di pasar tersebut juga akan ditingkatkan.

Direktur Utama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Akhyadi, SE, menjelaskan jika hari ini telah dilakukan pertemuan dengan sejumlah pedagang yang berjualan di Pasar Pagi, Kota Cirebon. “Pembahasannya mengenai harga sewa kios dan los di pasar tersebut,” ungkap Akhyadi, Kamis, 15 Maret 2018. Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya kata sepakat pun dicapai. Yaitu harga sewa kios depan sebesar Rp 7,5 juta/meter dan harga sewa los dalam sebesar Rp 6,5 juta/meter. “harga tersebut sudah diputuskan bersama dengan memperhitungkan berbagai pertimbangan dan sudah tidak bisa berubah lagi,” ungkap Akhyadi.

Harga sewa tersebut berlaku selama 10 tahun. Selanjutnya Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon juga berkomitmen untuk melakukan renovasi 10 item di pasar tersebut. Diantaranya renovasi lantai keramik, parkir, saluran air, akses masuk ke pasar dan sejumlah fasilitas lainnya. Selanjutnya untuk meringankan bebas pedagang, Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon juga akan bekerja sama dengan Bank Jabar untuk membantu pembiayaan sewa kios dan los tersebut. “Kami minta pedagang tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu maupun kabar yang keberannya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Akhyadi.

Seperti diketahui, masa kontrak pedagang di Pasar Pagi Kota Cirebon akan habis 1 April 2018 mendatang. Selanjutnya kepada pedagang diberi kesempatan untuk melanjutkan kembali kontraknya.

Sementara itu Ketua Ikatan Pedagang Pasar Pagi Kota Cirebon, Lutfhi, mengungkapkan jika mereka bisa menerima harga yang telah ditetapkan tersebut. “Syaratnya, sejumlah fasilitas yang ada di pasar harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya,” ungkap Lutfhi.

## **Gerakan Pembuatan Lubang Biopori Digalakan Secara Masif Di Kota Cirebon**



CIREBON-Untuk mengurangi permasalahan banjir, pembuatan lubang biopori dilakukan secara masif di setiap sekolah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Drs. H Jaja Sulaeman, M.Pd, menyambut baik adanya gerakan pembuatan lubang biopori yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. “Kami sangat apresiasi dan akan kami dukung,” tegas Jaja. Bahkan pembuatan lubang biopori ini akan dilakukan secara masif di semua tingkatan sekolah, mulai dari SD dan SMP yang ada di Kota Cirebon.

Pekan depan, lanjut Jaja, akan dimulai pembuatan lubang biopori di SMP Negeri 11 Kota Cirebon. “Seluruh kepala SMP akan diundang untuk mengetahui apa dan bagaimana cara pembuatan lubang biopori tersebut,” ungkap Jaja. Program ini menurut Jaja juga sangat baik untuk pendidikan karakter anak-anak didik di Kota Cirebon. “Agar mereka lebih peduli terhadap lingkungan sejak masih di bangku sekolah,” ungkap Jaja. Diakui Jaja, sebelumnya pembuatan lubang biopori ini memang sudah ada, tapi tidak secara masif seperti saat ini. Karena itu ditargetkan tahun ini seluruh sekolah baik SD maupun SMP yang ada di Kota Cirebon memiliki lubang-lubang biopori.



Hal yang sama juga sudah dilakukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon. Pagi ini, Rabu, 21 Maret 2018, sudah dibuat sedikitnya 12 lubang biopori di halaman kantor tersebut. “Ini sebagai bentuk dukungan kita terhadap program tersebut,” ungkap Kepala DKIS Kota Cirebon, Iing Daiman, S.Ip., M.Si. Dengan pembuatan lubang biopori yang dilakukan secara masif, maka diharapkan bisa mengurangi genangan air yang ada di permukaan.

Sementara itu Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, kembali menegaskan jika pembuatan lubang biopori harus dilakukan secara masif di Kota Cirebon. “Ini harus kita lakukan sebagai sebuah solusi, sambil menunggu pembenahan aliran sungai dan pembenahan sungai di daerah hulu,” ungkap Dedi. Karena itu, setiap sekolah maupun kantor OPD terus digalakan untuk lebih peduli terhadap lingkungan salah satunya dengan membuat lubang-lubang biopori di lingkungan mereka.

Manfaat lubang biopori ini, lanjut Dedi, sangat banyak. “Diantaranya bisa mengurangi genangan air,” ungkap Dedi. Air yang ada di permukaan bisa dengan cepat masuk ke dalam tanah. Namun tidak hanya itu, keberadaan lubang-lubang biopori juga akan mempertahankan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas air tanah di Kota Cirebon.

## **Pemda Kota Cirebon Dukung Program Program Pengendalian Inflasi**

CIREBON—Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon Jawa Barat beserta seluruh instansi yang ada di bawah naungannya siap mendukung program pengendalian inflasi yang saat ini gencar dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di bawah komando Bank Indonesia Cirebon.

Pada rapat rutin TPID Cirebon yang diadakan Selasa, 20 Maret 2018 di Kantor Bank Indonesia Cirebon yang dihadiri oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian Setda Kota Cirebon, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon dan sejumlah stakeholders lainnya menyetujui adanya terobosan untuk mengendalikan inflasi.



Pada kesempatan tersebut, Pimpinan Bank Indonesia Cirebon, M. Abdul Majid Ikram mengatakan dalam upaya pengendalian inflasi dibutuhkan sinergitas antar instansi khususnya dengan Pemda Kota Cirebon.

“Kelembagaan TPID harus diperkuat agar pengendalian inflasi di Kota Cirebon bisa lebih maksimal,” katanya.



Kepala DKIS Kota Cirebon, Iing Daiman mengungkapkan dalam upaya pengendalian inflasi, Pemda Kota Cirebon melalui DKIS telah membuat terobosan di bidang teknologi informasi

khususnya dalam penyediaan informasi harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) yang terbaru.

“Jika harga Kepokmas dipublikasikan secara online, masyarakat akan lebih tahu info harga terbaru di pasar-pasar yang ada di Kota Cirebon,” ujarnya.

Kepala BPS Kota Cirebon, Imron Budianto menambahkan laju inflasi Kota Cirebon Januari-Februari 2018 menunjukkan peningkatan yaitu inflasi sebesar 1,01% pada Januari 2018 dan 0,60% pada Februari 2018 dan menempatkan posisi Kota Cirebon sebagai kota dengan inflasi tertinggi di Jawa Barat, dan salah satu komoditi yang mendongkrak inflasi adalah komoditi bahan pangan seperti beras.

“Tiap tahun biasanya pada Februari terjadi deflasi di Kota Cirebon, baru tahun 2018 ini terjadi inflasi pada Bulan Februari,” tambahnya.